



LAKIP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Palu**

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kita panjatkan Puja dan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kinerja Pemerintah Kota Palu yang akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta menunjang Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu yakni **Membangun Kota Palu yang Mandiri, aman, dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan**. Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Palu dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Palu.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 merupakan laporan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021–2026 yang berisi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palu beserta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini juga memuat efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKIP, inovasi pencapaian kinerja serta penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Palu pada tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Palu Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. LKjIP Kota Palu Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di Kota Palu. Laporan ini juga sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.

Pelaporan Kinerja Pemerintahan Kota Pali juga disampaikan melalui website: palukota.go.id pada menu e-SAKIP sebagai upaya transparansi kinerja kepada masyarakat serta dilaporkan kepada kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e-SAKIP Reviu.

Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja dan berpedoman pada Pemenuhan Standart Pelayanan Minimum (SPM). Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palu maupun semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Kota Palu. Akhir kata, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2025. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran serta perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja kedepannya, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaan yang ada.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, 2 Februari 2026

WALI KOTA PALU



H. HADIANTO RASYID, S.E

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Palu merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 merupakan hasil kinerja Tahun 2025 atau tahun keempat dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (RPJMD). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disamping menyajikan faktor-faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan pencapaian indikator kinerja pemerintah Kota Palu.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pemerintah menggambarkan keberhasilan seluruh perangkat daerah Kota Palu, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah. sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dimana Nilai Capaian dari delapan sasaran dan dua belas indikator secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah dengan indikatornya laju pertumbuhan ekonomi 2025 terealisasi 4,36 dengan capaian kinerja 87,20%.
- ❖ Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dan kesiap siagaan bencana indikatornya : Indeks risiko bencana 132,58 dan indeks kualitas lingkungan hidup dengan realisasi rata rata 81,59 dan capaian kinerja 108,38%.
- ❖ Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan, Indikatornya Indek Kewaspadaan nasional dengan realisasi 77,14 capaian 122,44%.
- ❖ Sasaran 4 : Meningkatkan infrastruktur yang berketahanan dengan Indikator persentase jalan berkeselamatan,realisasi 9,23 capaian 110,14% persentase

luas kawasan kumuh, 0,21 capaian -500% dan persentase rumah tidak layak huni dengan realisasi 1,43 dan capaian 70%.

- ❖ Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas SDM indikatornya Indeks pembangunan manusia realisasi 84,53 capaian kinerja 100,19%.
- ❖ Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan, Indikatornya Angka kemiskinan dengan realisasi 5,26 dan capaian 89,26%.
- ❖ Sasaran 7 : Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal dan kebangsaan indikator indeks aktualisasi Pancasila dengan realisasi 78,81 capaian 93,82%.
- ❖ Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, indikatornya Indeks reformasi birokrasi dan opini BPK. Pemerintah kota Palu berhasil merealisasikan indeks reformasi birokrasi sebesar 74,16 dengan capaian 92,70% serta berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Kota Palu untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut sejak Tahun 2014.
- ❖ Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, termasuk dinamika kondisi ekonomi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam implementasi program dan kegiatan di lapangan.
- ❖ Pada aspek pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh perlambatan aktivitas ekonomi di beberapa sektor utama, serta belum optimalnya daya dorong investasi dan konsumsi masyarakat. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Efisiensi penggunaan sumber daya juga menjadi perhatian penting, di mana Pemerintah Daerah terus berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar memberikan dampak yang maksimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah akan melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaksanaan program, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Gambaran Umum Kota Palu	2
1.2 Pembangunan Manusia Kota Palu	3
1.3 Perekonomian Kota Palu	4
1.4 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Palu	6
1.5 Isu Strategis Pemerintah Kota Palu	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Visi Dan Misi	11
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu	24
1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025	26
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	26
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD (2021-2026)	28
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	29
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan	32

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan/ Pencapaian Kinerja.....	51
7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	96
B.Realisasi Anggaran	118
1. Pendapatan	119
2. Belanja Daerah	119
3. Pembiayaan	120
3.2 Inovasi Pemerintah Kota Palu	121
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Langkah Selanjutnya	133
LAMPIRAN	135
1. Perjanjian Kinerja	136
2. Indikator Kinerja Utama	139
3. Penghargaan	140

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palu	6
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.4 Jumlah PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Visi Dan Sasaran Daerah 2021-2026	16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025	21
Tabel 2.4 Program Dan Anggaran	22
Tabel 3.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	24
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir	26
Tabel 3.3 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dalam Rpjmd (2021-2026)	28
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional Tahun 2025	29
Table 3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Dan Daya Saing Sektor Ekonomi	33
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kesiapsiagaan Bencana	35
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan	39
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Yang Berketahanan	42
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	44
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan	46

Tabel 3.11 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Karakter Berdasarkan Nilai Keagamaan, Kearifan Lokal Dan Kebangsaan	48
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	48
Tabel 3.13 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 2025	49
Tabel 3.14 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	51
Tabel 3.15 Perbandingan Target Dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	95
Tabel 3.16 Efisiensi Anggaran Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2025	97
Tabel 3.17 Program Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025	99
Tabel 3.18 Capaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	119
Tabel 3.19 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2025	120
Tabel 3.20 Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2025	120
Tabel 3.21 Inovasi Pemerintah Kota Palu	121
Tabel 3.22 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Palu	2
Gambar 1.2	Jumlah Penduduk Kota Palu	3
Gambar 1.3	Pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun 2025	5
Gambar 2.1	Visi dan Misi.....	11
Gambar 2.2	Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026.....	12
Gambar 2.3	Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026	13
Gambar 2.4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.....	14
Gambar 2.5	Peta Proses Bisnis Kota Palu Tahun 2021-2026.....	15
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2025	33
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi	34
Gambar 3.3	Penguatan kapasitas Oleh Organisasi Perangkat Daerah.....	36
Gambar 3.4	Dokumentasi Bencana Yang Ada di kota Palu	37
Gambar 3.5	Perbandingan Capaian Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2023-2025.....	40
Gambar 3.6	Penertiban Polisi Pamong Praja	41
Gambar 3.7	Lembaga Adat di Kota Palu	42
Gambar 3.8	Indeks Pembangunan Manusia	45
Gambar 3.9	Realisasi Indikator Angka kemiskinan Tahun 2025	47



BAB I

PENDAHULUAN



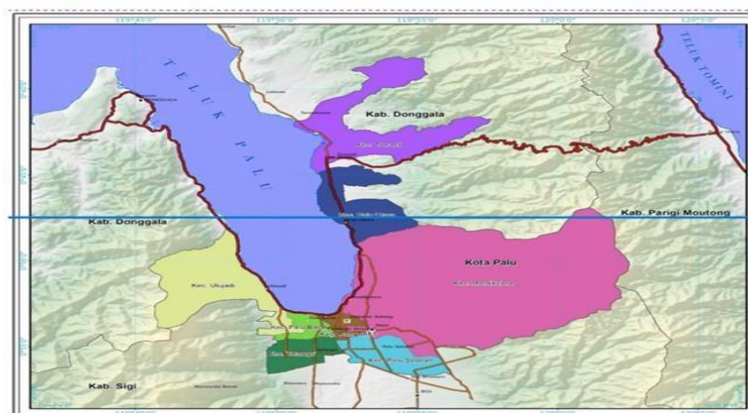
BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KOTA PALU

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 395,06 km² berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif, Kota Palu berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebelah selatan dengan Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan, 289 Rukun Warga, dan 1.030 Rukun Tetangga. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² atau hanya 1,95% dari luas wilayah Kota Palu. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran Lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sementara 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu.

Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2025 sebesar 404.381 (Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Palu, 2025), dengan kepadatan penduduk sebesar 1.031 per km². Adapun penduduk laki-laki berjumlah 202.717 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 201.664 jiwa. Kota Palu memiliki struktur usia penduduk yang berbentuk piramida ekspansif, dengan sebaran didominasi usia produktif. Sebaran struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini :



Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Kota Palu

Sumber :Dinas Dukcapil Kota Palu, 2025

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berdasarkan data [Badan Pusat Statistik](#) Kota Palu, tahun 2025 tercatat sebesar **38,08**. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 38 penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), yang menggambarkan beban ketergantungan yang cukup rendah dan produktivitas tinggi.

1.2 Pembangunan Manusia Kota Palu

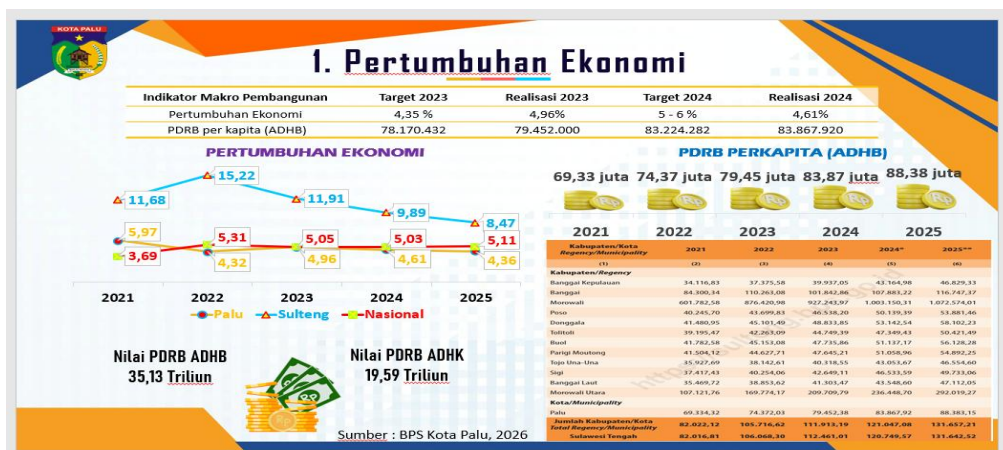
Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM terdiri dari variabel pendidikan, variabel kesehatan, dan variabel kondisi ekonomi masyarakat. Variabel kesehatan meliputi indikator usia harapan hidup, variabel pendidikan meliputi indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara kondisi masyarakat berdasarkan indikator daya beli masyarakat dengan melihat pengeluaran 84,53 capaian kinerja

sebesar 102,58% di Tahun 2025. Capaian ini mendudukkan Kota Palu sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Tengah. Tingginya IPM Kota Palu ditopang oleh peningkatan usia harapan hidup dari Tahun 2020 sebesar 73,46 tahun menjadi 73,49 tahun di Tahun 2021. Tahun 2022 sebesar 73,56, dan tahun 2023 menjadi 73,71 tahun sedangkan tahun 2024 adalah 73,91 dan tahun 2025 sebesar 78,06. Untuk komposit pendidikan, dari rata-rata lama sekolah di Tahun 2020 sebesar 11,61, di Tahun 2021 sebesar 11,72, di Tahun 2022 sebesar 11,73, di tahun 2023 sebesar 11,74, dan pada tahun 2024 sebesar 11,75, pada tahun 2025 naik menjadi 11,76 tahun. Untuk harapan lama sekolah dari 16,23 tahun di Tahun 2020 menjadi 16,28 Tahun di 2021, tahun 2022 menjadi 16,36 tahun dan tahun 2023 menjadi 16,51 tahun dan 16,52 pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 sebesar 16,53 tahun. Selanjutnya, indikator ekonomi terjadi perbaikan standar hidup yang layak dari sebelumnya. Hal ini dilihat dari pengeluaran perkapita sebesar 14,83 juta Tahun 2020 menjadi 14,89 juta di Tahun 2021 dan 15,16 juta di tahun 2022, selanjutnya tahun 2023 sebesar 15,50 juta, 15,94 juta pada tahun 2024, dan sebesar 16,27 juta pada tahun 2025.

1.3 PEREKONOMIAN KOTA PALU

Kebijakan pembangunan Kota Palu sesuai dengan tema pembangunan Kota Palu Tahun 2025 yakni peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan ketangguhan daerah. Pemilihan tema ini agar mampu mendorong perekonomian di Kota Palu.

Perekonomian Kota Palu Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,36 %. Hasil ini menunjukkan geliat perekonomian di Kota Palu mengalami sedikit penurunan sebesar 0,35% Untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 17,9 triliun pada tahun 2023 sementara pada tahun 2024 sebesar 18,77 triliun dan pada tahun 2025 sebesar 19,59 triliun. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palu Tahun 2023 sebesar 79,45 juta dan 83,88 pada Tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 35,13 triliun.



Gambar 1.3

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2025

Melihat kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2025, maka konstruksi paling besar yakni sebesar 16,78 %, kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,68%, yang ketiga perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,72% ke empat informasi dan komunikasi sebesar 9,47%, dan yang terakhir pertambangan dan penggalian sebesar 8,51%. pada Tahun 2023 dan usaha pertambangan dan pengalihan 14,37 pada Tahun 2024 disusul lapangan usaha transportasi dan pergudangan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,08 %, sedangkan Tahun 2024 sebesar 5,44%. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 6,1% di Tahun 2023 sedangkan Tahun 2024 sebesar 5,75%.

1.4 SUMBER DAYA APARATUR NEGARA

Pemerintah Kota Palu dipimpin oleh Wali kota, H. Hadianto Rasyid, S.E dan Wakil Wali kota, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.AP sesuai hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024. Adapun periode menjabat yakni dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029. Pelaksanaan tugas Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta organisasi perangkat daerah.

Merujuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:



Pelaksanaan urusan pemerintah sesuai kewenangan Pemerintah Kota Palu didukung oleh sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Palu tahun 2025 sebanyak 4.980 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 1.575 laki-laki dan 3.405 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, rata-rata pendidikan PNS di Kota Palu adalah setingkat sarjana yakni sebanyak 3.638. Sementara, SMA sebanyak 1328 orang. **Tabel 1.1**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palu

No	Uraian	Jumlah
1.	PNS Laki-Laki	1.575
2.	PNS Perempuan	3.405
Jumlah seluruh PNS		4.980

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 202

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan

pemegang jabatan struktural karena komposisi pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki yang lebih besar dari pada perempuan dengan selisih yang kecil sebagaimana Tabel 1.6. Namun demikian, Pemerintah Kota Palu telah mengakomodasi konsep kesetaraan gender dalam karir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan melalui penerapan manajemen talenta sehingga baik PNS Laki-laki maupun Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural.

Tabel 1.2
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pejabat Struktural	535
	Laki-Laki	286
	Perempuan	249
2.	Jumlah Fungsional Tertentu	3.011
	Laki-Laki	610
	Perempuan	2.401
3.	Jumlah Fungsional Umum	1.434
	Laki-Laki	679
	Perempuan	755
Total		4.980

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang disampaikan dalam Tabel 1.6. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Palu.

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	PNS Golongan I	12
2.	PNS Golongan II	593

3.	PNS Golongan III	3.134
4.	PNS Golongan IV	1.241
Jumlah seluruh PNS		4.980

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Selain, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Palu juga didukung oleh sumber daya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4.606 orang terdiri dari 2.846 orang perempuan dan 1.760 orang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 1.4
Jumlah PPPK berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	PPPK Laki-Laki	1.760
2.	PPPK Perempuan	2.846
Jumlah seluruh PNS		4.606

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

1.5 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PALU

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu diperhatikan karena dampaknya sangat signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang (Permendagri no 86 Tahun 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor Tahun 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026, maka dapat diuraikan isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai Berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata;
- 2) SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing;
- 3) Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusi Kemiskinan kota;

- 4) Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 5) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; dan
- 6) Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan berkelanjutan



BAB II

PERENCANAAN

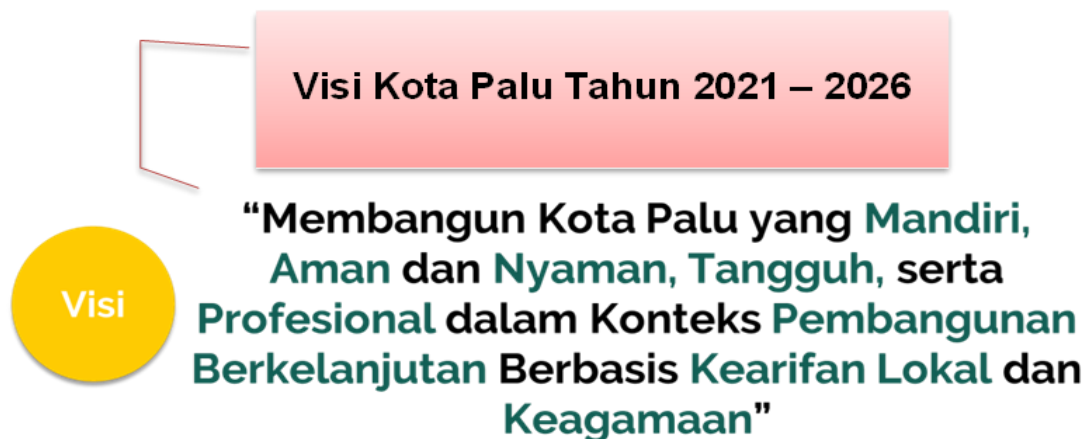
KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

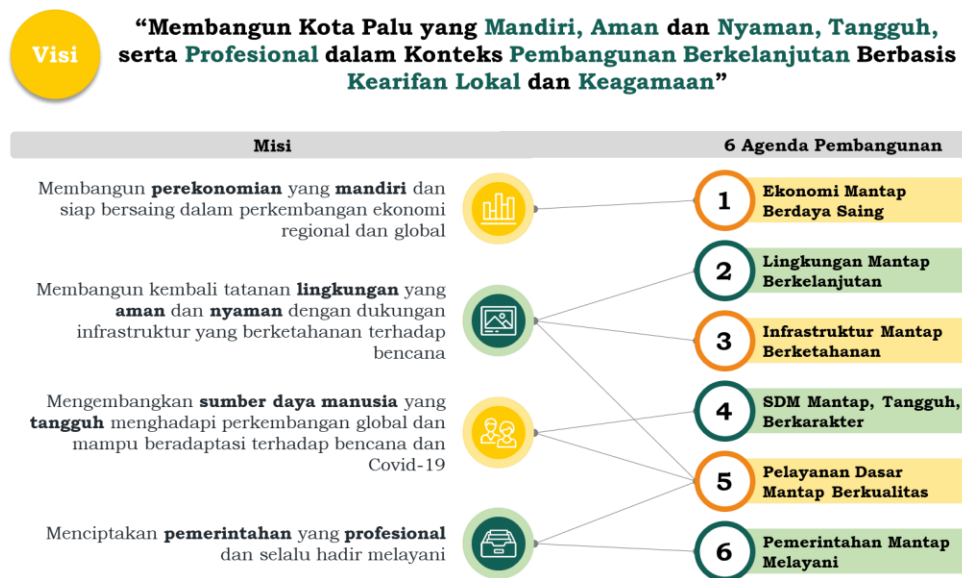
2.1 VISI DAN MISI



Gambar. 2.1 Visi, Misi, Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026

Tahun 2024 Kota Palu melakukan pemilihan kepala daerah. Kontestasi tersebut, menetapkan H. Hadianto Rasyid, S.E Wali Kota Palu Kota Palu dan Imelda Liliana Muhidin, SE., M.AP sebagai Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk periode 2025-2029. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, ditetapkan visi dan misi Kota Palu.



Gambar. 2.2 Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Palu juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021-2026 yang diuraikan ke dalam enam Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Ekonomi Mantap Berdaya Saing;
2. Lingkungan Mantap Berkelanjutan;
3. Infrastruktur Mantap Berketahanan;
4. SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter;
5. Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas; dan
6. Pemerintahan Mantap Melayani.



Infrastruktur Mantap Berketahanan

1. Bangun Palu Tahan Gempa (Palu Tangguh Bencana)
2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
3. Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)
4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu
5. Ruang Terbuka Hijau/Publik per Kecamatan
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu



SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya
2. Badan Pelayanan Rumah Ibadah
3. Palu Berbagi
4. Palu Religi
5. Pelestarian Seni Budaya
6. Palu Ramah Difable
7. Event Tahunan Olahraga Kota Palu
8. Event Tahunan Komunitas Anak Muda Kota Palu



Ekonomi Mantap Berdaya Saing

1. Rp 4 Miliar untuk Bedah Rumah + Modal Usaha
2. Inkubator Bisnis Berbasis Digital per Kelurahan
3. Penguatan UMKM dan Palu Market Place
4. Revitalisasi Perparkiran Kota Palu
5. Reformasi dan Revitalisasi Moda Transportasi
6. Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi
7. Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo
8. Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi
9. Wisata Pasar Ikan Kota Palu
10. 1.000 Perahu untuk Nelayan Kota Palu
11. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
12. Forum Komunitas Kreatif Kota Palu (Palu Creative Hub)



Lingkungan Mantap Berkelanjutan

1. Palu Adipura
2. Palu Terang
3. Palu Hijau
4. Palu Ramah, Aman, dan Tertib
5. CSR Forum
6. Satgas Cepat Tanggap
7. Kelurahan Mantap 2 Miliar



Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas

Kesehatan

1. Palu Kota Sehat
2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern
3. Satu Ambulans Satu Kelurahan
4. BPJS Gratis Warga Tidak Mampu
5. Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan Petugas Rumah Ibadah

Pendidikan

1. 1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
2. Reward 2 Miliar Prestasi SD dan SMP
3. Persamaan Kualitas SD dan SMP se-Kota Palu
4. Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan
5. Update Berkala Kompetensi & Kapasitas Guru/Pengajar
6. Bus Gratis untuk Siswa Sekolah
7. Kepala Sekolah Magang Nasional



Pemerintahan Mantap Melayani

1. Audit APBD oleh Auditor Independen
2. E-Government (Palu Smart City)
3. Penerapan QSL (Quick Service License)
4. One Touch Info Kota Palu
5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honorer
7. ASN Magang Nasional
8. Pelayanan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Dokumen Kependudukan Lainnya di Kelurahan

Gambar 2.3 Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu Kota Cerdas (*smart city*), Kota tangguh (*Resilience city*), Kota hijau (*green city*), dan Kota inklusif (*inclusive city*).

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka disusun proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung, dan manajemen. Namun sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi terlebih

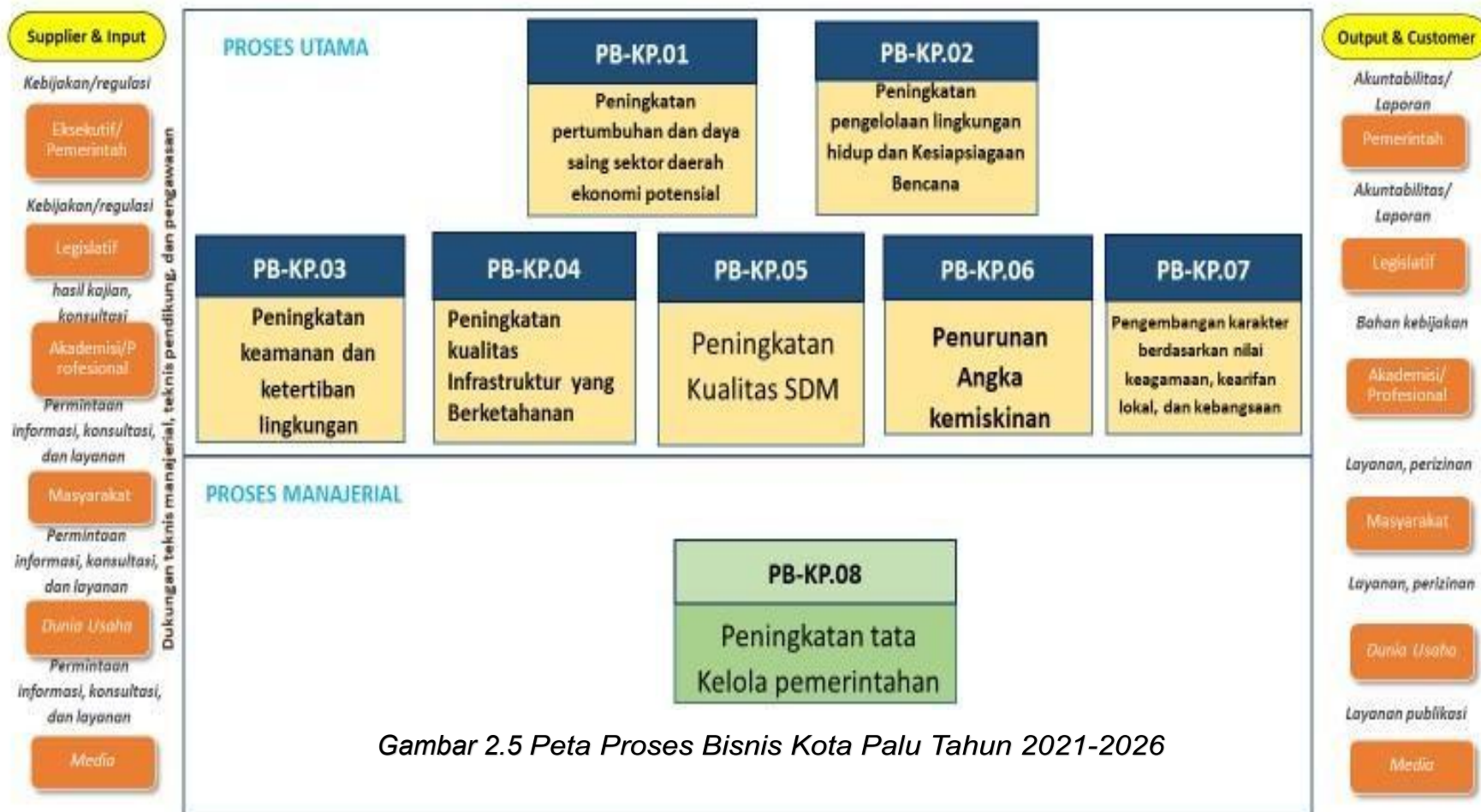
dahulu keterkaitan antara konsep yang diusung dengan visi misi Pemerintah Kota Palu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026



Peta Proses Bisnis Kota Palu



Gambar 2.5 Peta Proses Bisnis Kota Palu Tahun 2021-2026

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kota Palu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Visi, dan Sasaran Daerah 2021- 2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Membangun Kota Palu yang Mandiri Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan keagamaan	Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor daerah daerah ekonomi potensial	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Membangun kembali Tata Lingkungan yang Aman dan nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan Bencana	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Indeks Risiko Bencana
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kewaspadaan Nasional
			Meningkatnya Infrastruktur yang Berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan
				Persentase luas kawasan kumuh
				Persentase rumah tidak layak huni
	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia

	Beradaptasi terhadap Bencana.		Menurunnya Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan
			Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila
	Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Hadir Melayani	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
				Opini BPK

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawab
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	$R = \frac{GNP_t - 1}{GNP_{t-1}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	$DR = H \times V$ (Risiko Bencana = Bahaya x Kerentanan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum.
	Indeks kualitas lingkungan hidup	$IKLH = (30\% \times \text{Indeks Kualitas Air} + 30\% \times \text{Indeks Kualitas Udara} + 40\% \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$	Dinas Lingkungan Hidup.
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	Perhitungan dari Dirjen Politik dan PUM Kemendagri	Badan Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	Persentase jalan yang kerkeselamatan	$\frac{\text{Panjang jalan Kota yang memenuhi standar keselamatan}}{\text{panjang jalan kota}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.
	Persentase luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan Permukiman kumuh (Ha)}}{\text{Total Luas Wilayah (Ha)}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum.
	Persentase Rumah tidak layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah Rumah di Kota Palu}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan IPM = $\frac{(IPMt - IPMt-1) \times 100}{IPMt-1}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda & Olahraga.
Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin = $\frac{(\text{jumlah penduduk miskin} / \text{jumlah penduduk total}) \times 100\%}{}$	Dinas Sosial.
Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks $D_j = \frac{1}{n_j} (\sum X_i)$ D_j adalah Sila ke-j n_j adalah banyaknya indikator di Sila ke-j X_i adalah nilai indikator ke-i $IAP = \frac{1}{n} (\sum D_j)$ D_j adalah nilai indeks Sila ke-j n adalah banyaknya sila (yang mana dalam IAP $n=5$)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Nilai RB General diperoleh dari: Nilai capaian strategi pelaksanaan RB General, Nilai tingkat implementasi kebijakan, Nilai capaian strategis. Nilai RB Tematik diperoleh dari: Nilai strategi membangun	Semua Organisasi Perangkat Daerah

		RB Tematik, Nilai capaian dampak RB Tematik.	
	Opini BPK	Hasil Audit BPK	BPKAD, Inspektorat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan Dengan Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut, merupakan ukuran keberhasilan berdasarkan hasil evaluasi dengan melakukan pemetaan isu strategis pemerintah Kota Palu sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kota palu Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Tabel 2.4 di atas, maka sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 sebagai berikut:

Misi 1 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja.

Misi 2 terdapat 3 (tiga) sasaran, dan 6 (enam) indikator kinerja. Misi 3 terdapat 3 (tiga) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Misi 4 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja.

2.3 *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2025, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja dan lampiran Perjanjian Kinerja. Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 dapat di uraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Laju Bertumbuhan Ekonomi	5,0
2	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	100
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,28
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kewaspadaan Nasional	63
4	Meningkatnya Infrastruktur yang berketahanan	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	8,38
		Persentase Luas Kawasan Kumuh	0,03
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	1,1
5	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	82,40
6	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,75
7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	84
8	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Opini BPK	WTP

Sementara untuk Program dan Anggaran Untuk merealisasikan sasaran IKU Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran

No	IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rp. 103.504.612.512,14	Rp. 83.373.726.510,00
2.	Indeks Risiko Bencana	Rp. 103.045.580.293,62	Rp. 93.532.180.171,00
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 59.752.858.280,96	Rp. 55.057.294.105,00
4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Rp. 32.198.411.188,56	Rp. 23.491.777.376,00
5.	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	Rp. 104.432.086.144,64	Rp. 99.691.214.217,00
6.	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Rp. 54.056.345.985,00	Rp. 47.068.288.578,00
7.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 8.581.201.820,00	Rp. 7.374.624.101,00
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Rp. 651.733.970.847,57	Rp. 458.351.911.797,00
9.	Angka Kemiskinan	Rp. 25.329.780.006,90	Rp. 22.301.054.069,25
10	Indeks Aktualisasi Pancasila	Rp. 8.620.004.578,22	Rp. 7.575.317.655,00
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	Rp. 610.199.927.918,56	Rp. 417.627.397.116,60
12.	Opini BPK	Rp. 37.718.440.042,69	Rp. 32.805.488.521,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Palu dilakukan secara berkala yakni triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui capaian sebagai umpan balik untuk perbaikan agar target kinerja dapat tercapai. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk permasalahan yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah (*problem solving*).

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Perbandingan target kinerja berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2021- 2026 dengan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagaimana perjanjian kinerja, diuraikan dalam tabel berikut:

*Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD
2021 – 2026*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025	
			TARGET	REALISASI
	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	5,0	4.36
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	100	132.58

		Indeks kualitas Lingkungan hidup	75.28	81.59
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	63	77.14
	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	Persentase jalan yang berkeselamatan	8.38	9.23
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	1,1	1.43
		Persentase luas Kawasan kumuh	0.03	0.21
	Meningkatnya ualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	84,37	84.53
	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	4.75	5.26
	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal dan kebangsaan	Indeks aktualisasi pancasila	84	78.81
	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	80	74.16*
		Opini BPK	WTP	WTP

Ket: tanda *) masih menggunakan nilai lama karena nilai terbaru belum keluar

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,36	87.20%	4,61	109,76%	4,96	132,98%	4,32	135%
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kesiapsiagaan Bencana	Indeks risiko bencana	132,58	132.58%	132,3	117,56%	132,3	105,77%	151,43	110%
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	81,59	108,38%	73,25	97,74%	76,5	102,55%	69	93%
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	77,14	122,44%	75,09*	121,11%	75,09	123,10%	100	100%

4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	Persentase jalan yang berkeselamatan	9,23	110,14%	4,50	71,77%	2,94	66,97%	2,45	89%
		Persentase luas Kawasan kumuh	0,21	-500%	0,23	128,57%	0,28	109,68%	0,50	109%
		Persentase rumah tidak layak huni	1,43	70%	1,78	181,74%	1,12	189,13%	1,59	185%
5.	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	84,53	100.19%	84,12	102,46%	83,71	102,21%	83,26	102%
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	5,26	89.26%	5,94	74,95%	6,56	68,80%	6,63	121%
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks aktualisasi pancasila	78,81	93.82%	83,2*	118,86%	76,29	110,57%	77,95	115%
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	74,16*	92.70%	74,16	86,08%	64,19	82,29%	58,88	89%
		Opini BPK	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD (2021 -2026)

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dalam RPJMD (2021 – 2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD Tahun 2026		
			Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4.42	4.36	98,64
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	100	132.58	132,58
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	75.62	81.59	107.89
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	64	77.14	120.53
4	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan	10,72	9.23	86.10
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	8,66	1.43	183.49
		Persentase luas Kawasan kumuh	0.03	0.21	-500
5	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	82.60	84.53	102.34
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	4.00	5.26	68.50

7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal dan kebangsaan	Indeks aktualisasi pancasila	72	78.81	109.46
8	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	92	74,16	80.61
		Opini BPK	WTP	WTP	100

Ket: tanda *) masih menggunakan nilai lama karena nilai terbaru

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan standar nasional akan terurai seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Provinsi/ Nasional	Realisasi Tahun 2025	capaian %	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan daya saing sektor ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	5.11	4.36	85.32	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2025
2	Meningkatnya kualitas	Indeks risiko bencana	196.55	132.58	67.45	Rata-rata Nilai IRB Nasional

	lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks kualitas Lingkungan hidup	76.49	81.59	106.67	Capaian nasional Tahun 2025
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	64	77.14	120.53	Capaian Indeks kewaspadaan nasional Tahun 2024
4	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	Persentase jalan yang berkeselamatan	-	9.23	-	Tidak ada standar nasional atau provinsi
		Persentase luas Kawasan kumuh	2.64	0.21	192.25	Standar provinsi tahun 2025
		Persentase rumah tidak layak huni	81.8	1.43	198.25	Standar provinsi tahun 2025
5	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	75.9	84.53	111.37	Capaian IPM Nasional Tahun 2025
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	8.25	5.26	136.24	Angka Kemiskinan Nasional Tahun 2025

7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	77.73	78.81	101.39	Capaian IAP Nasional Tahun 2025
8	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	74.63	74,16*	99.37	Rata-rata RB Nasional untuk pemerintah Provinsi 2024
		Opini BPK	WTP	WTP	100%	Rata-rata Nilai Nasional

Ket: tanda *) masih menggunakan nilai lama karena nilai terbaru belum keluar

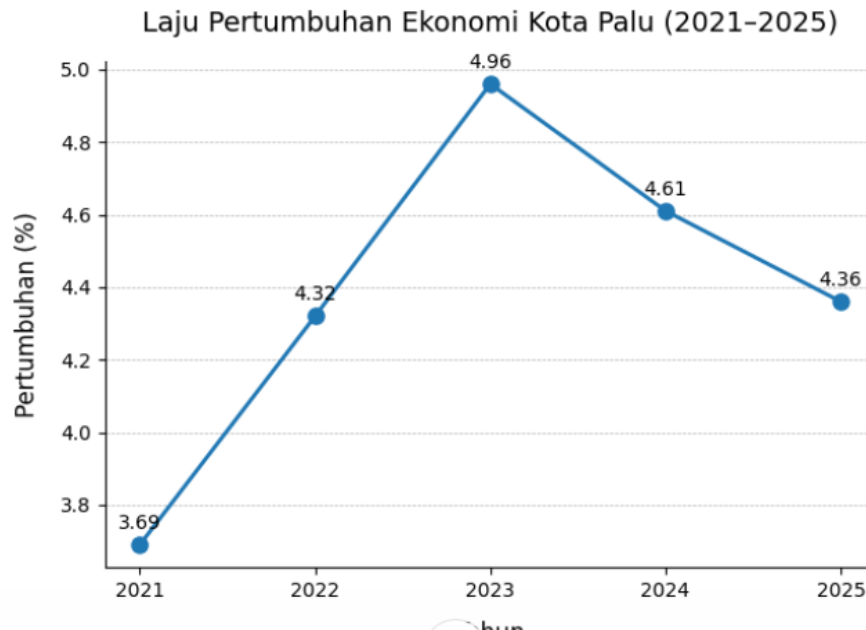
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana ditargetkan dalam RPMJD Tahun 2021-2026. Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD yakni kebijakan melalui percepatan program dan kegiatan melalui *tagline* Palu Mantap Bergerak sehingga dapat meningkatkan realisasi dan capaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palu.

Adapun delapan sasaran strategis pemerintah Kota Palu diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 Yakni Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah diukur dengan menggunakan indikator angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 0,65% dari Tahun 2018. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga pertumbuhan -4,43%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif ke angka 5,97% yang disebabkan adanya pelonggaran dalam interaksi sosial sehingga mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi. Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kontraksi dan hanya tumbuh pada angka 4,32%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan ke angka 4,96% melampaui target 3,73 % atau capaian kinerja sebesar 132,98%. Target kinerja laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,2 % dengan realisasi sebesar 4,61% dengan capaian sebesar 109,76 %. Tahun 2024 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 0,35%. Target kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2025 sebesar 5,0 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun 2025 mengalami kontraksi sehingga tumbuh di angka 4,36 %. Hal ini mencerminkan capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun 2025 sebesar 87,2%. Adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi disebabkan karena menurunnya permintaan sektor pertambangan galian C akibat aktivitas pembangunan IKN yang melambat, serta adanya efisiensi dan pemotongan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat sehingga berpengaruh terhadap belanja di daerah.



Gambar 3.1 Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2025

Sumber : BPS Kota Palu, 2025

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini:

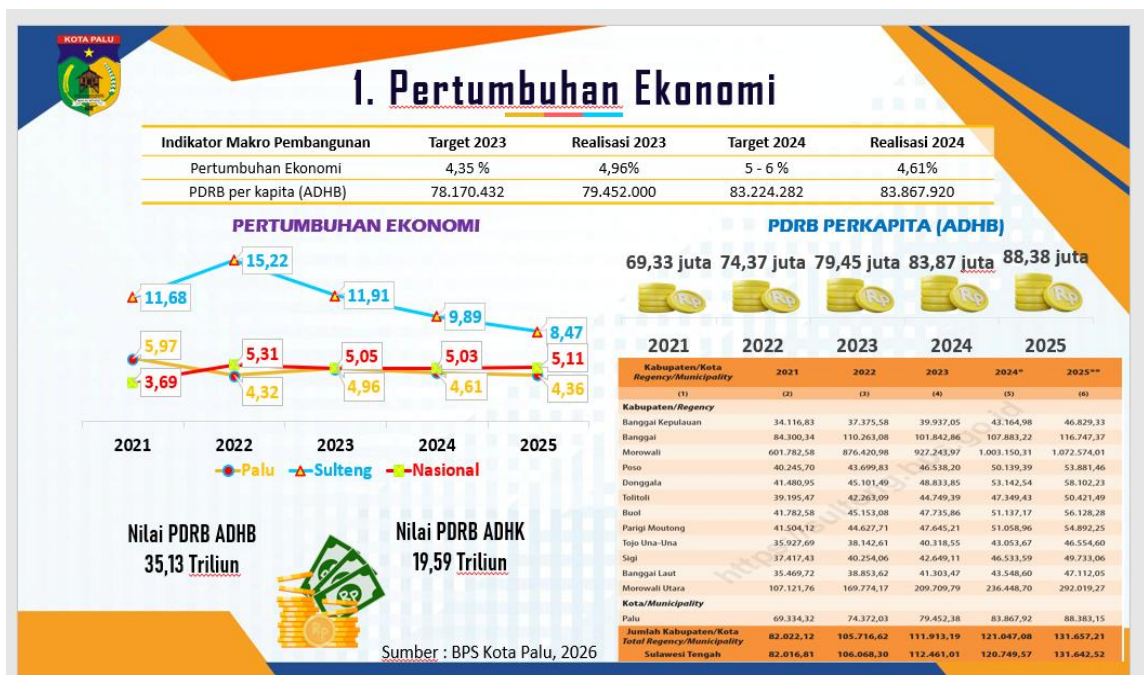
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,0	4,36	87,2

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi realisasinya 4,36% dengan capaian 87,2%.

Capaian kinerja sebesar 87,2% berdasarkan analisis lapangan usaha Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Tahun 2025 yang mengalami kontraksi sangat signifikan yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor pertambangan dan penggalan, dan sektor pengadaan listrik dan gas. Pencapaian kinerja sebesar 87,2%

disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini berimplikasi pada efisiensi belanja Pemerintah Kota Palu dengan melakukan pembatasan kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta kegiatan seminar atau *Focus Group Discussion*. Selanjutnya, Pemerintah Kota Palu juga melakukan efisiensi dengan mengurangi perjalanan dinas sebesar 50% serta melakukan pembatasan belanja honorarium kegiatan



Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran 2 Yakni Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana diukur dengan menggunakan indikator-indikator terkait seperti: indeks risiko bencana, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Realisasi dan capaian kedua indikator tersebut disajikan pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks Risiko Bencana	100	132,58	132,58
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,28	81,59	108,38

Capaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup memiliki rata-rata capaian 107,09% dengan dua indikator penyusunnya, yakni indeks risiko bencana memiliki capaian 132,58%, dan indikator indeks kualitas lingkungan hidup capaiannya sebesar 108,38% pada Tahun 2025.

Peningkatan Indeks Resiko Bencana Kota Palu dari 112,58 pada tahun 2024 menjadi 132,58 pada tahun 2025, disebabkan oleh meningkatnya komponen ancaman akibat pemutakhiran peta risiko dan dinamika hidro meteorologi, serta meningkatnya kerentanan masyarakat yang masih bermukim pada kawasan rawan bencana dan belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang tahan bencana. di sisi lain kapasitas penanggulangan bencana belum mengalami peningkatan yang signifikan sehingga belum mampu mengimbangi kenaikan ancaman dan kerentanan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan upaya mitigasi berbasis Tata Ruang, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian pemerintah kota palu tetap berupaya melakukan penanggulangan bencana yang tepat dan terarah sesuai kajian maupun penelitian tentang kebencanaan, risiko bencana di suatu daerah rawan bencana atau daerah rentan bencana dapat diturunkan dengan baik. Risiko bencana adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Tinggi rendahnya risiko bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ancaman, kerentanan sosial, ekonomi dan juga lingkungan, serta kurangnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang terindikasi ada di wilayah mereka.

Dalam pelaksanaanya, pemerintah Kota Palu berupaya melakukan mitigasi dan adaptasi bencana dengan program bangun Palu tahan gempa yaitu penataan kota berbasis zona rawan bencana dan pembangunan sesuai dengan standar tahan gempa. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas masyarakat dengan rutin melakukan

simulasi bencana, pemberian informasi bencana, serta pembentukan kampung tangguh bencana. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dengan pembangunan gudang logistik bencana, pemasangan rambu evakuasi, pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan seperti melakukan geladi/simulasi kebencanaan, serta pembangunan lapangan olahraga dan Ruang Terbuka Hijau yang dapat dijadikan titik kumpul jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Selain itu ada juga Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan melakukan kegiatan “BPBD *go to school*” yaitu sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana di 48 sekolah taman kanak-kanak yang ada di Kota Palu, melakukan geladi ataupun simulasi kebencanaan dikawasan perkantoran, peningkatan kapasitas kebencanaan untuk para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palu serta pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Komunitas Penyandang disabilitas/inklusi. Akan tetapi dengan banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dalam menekan angka risiko kebencanaan masih belum mampu mencapai nilai Indeks Risiko Bencana yang telah ditargetkan pada tahun 2025.



Gambar Keg. Penguatan kapasitas bagi pelaku UMKM dalam PRB



Gambar Keg. Pelatihan/simulasi PRB di lingkungan



Gambar Keg. Pengembangan kapasitas TRC di kel. Palu Selatan



Gambar Keg. Pelatihan Penanggulangan Bencana Untuk komunitas Penyandang

Gambar 3.3 Penguatan Kapasitas oleh OPD

Dalam bidang kedaruratan dan Logistik telah menangani kejadian bencana tercatat sebanyak 17 kejadian bencana di kota Palu pada tahun 2025 dengan kejadian bencana yang bervariasi, seperti kebakaran lahan, kebakaran pemukiman, pohon tumbang, banjir dan tanah longsor. Kejadian bencana tersebut tersebar di beberapa kelurahan di Kota Palu dengan waktu kejadian yang berbeda-beda sepanjang tahun. Secara keseluruhan respon penanganan kejadian bencana tahun 2025 berjalan baik dan terkoordinasi, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir serta tidak menimbulkan korban jiwa yang signifikan.

Sebagian besar wilayah yang tergenang banjir merupakan badan jalan hingga ke pekarangan rumah warga, sungai meluap juga menyebabkan beberapa titik yang ada disisi jembatan tergerus air hujan mengguyur wilayah Kota Palu. Hujan dengan durasi yang lama menyebabkan terjadinya banjir sehingga air sungai meluap melalui gorong-gorong menggenangi beberapa rumah di wilayah bantaran sungai tersebut.



Gambar Banjir di Kec.



Gambar Banjir di Kec. Ujuna



Gambar angin kencang di Kec. Palu Timur



Gambar kejadian kebakaran Pemukiman Warga di Kota Palu



Gambar 3.4 Dokumentasi Bencana yang ada di Kota Palu

Pendampingan pemulihan pasca bencana bidang fisik kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bidang fisik terhadap daerah yang terdampak bencana masif. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub-output yaitu melakukan pendampingan, pemulihan dan peningkatan fisik sektor

permukiman dan infrastruktur yang terdampak bencana. Kegiatan ini merupakan komponen utama pada output layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibidang fisik.

Sementara untuk Indeks kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari indeks kualitas air sebesar 65,49, indeks kualitas udara sebesar 85,98 dan indeks tutupan lahan sebesar 70,73 yang telah teralisasi pada tahun 2024 . Sedangkan untuk Tahun 2025 nilai indeks kualitas udara terealisasi sebesar 86,48 dari target sebesar 86,08 dengan capaian 100,46%. Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler dilakukan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I dan II (Periode Sampling di tanggal 22 juli 2025) di kawasan industir dan kawasan transportasi, Tahap II (Periode Sampling di tanggal 18 september) dikawasan perkantoran dan tahap III(Periode Sampling di 1 oktober 2025) dikawasan pemukiman. Walaupun secara penilaian capaian indeks kualitas udara sudah mencapai 100,46% tetapi capaian ini juga tidak lepas dari kendala terkait seperti pertumbuhan kendala yang tinggi, pengawasan lapangan yang belum optimal, alih fungsi lahan pada kawasan terbangun, industri kecil tersebar diluar industri, keterbatasan lahan untuk peningkatan ruang terbuka hijau, keterbatasan alat pemantauan $PM_{2,5}$ serta penegakan hukum yang belum konsisten terkait pelanggaran terkait dengan banyaknya kendala bukan berarti pemerintah Kota Palu berhenti berupaya dalam meningkatkan nilai indeks kualitas udara, banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu guna menunjang nilai tersebut seperti Kewenangan pengawasan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan, melakukan edukasi program terkait lingkungan, mengembangkan teknologi pemantauan serta memaksimalkan fungsi RTH dan Vegetasi penyerap polutan.

Berdasarkan dari data hasil pengukuran indeks kualitas air, pada pada Tahun 2025, nilai IKU Kota Palu sebesar 86,48 dari target 86,08 dengan capaian inedks sebesar 128,97%. Pencapaian ini didukung dengan melakukan pengukuran indeks kualitas air dan tanah secara berkala, sehingga jika terjadi pencemaran dapat langsung diambil tindakan. Meskipun capaian indikator telah mencapai hasil yang baik masih terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan capian indikator seperti limbah rumah tangga yang masih banyak dibuang disungai, pelaku usaha kecil dan industri belum seluruhnya memiliki instalasi pengelolaan limbah, masih adanya kebiasaan membuang sampah dan membiarkan hewan ternak disekitar sungai, risiko kesehatan akibat kualitas air yang jernih dan keterbatasan frekuensi pemantauan dan sumberdaya. Meskipun terdapat faktor penghambat dalam pencapaian kinerja terdapat pula

berbagai faktor pendukung yang berperan dalam mendorong tercapainya kinerja seperti tersedianya IPAL domestik serta teknologi pengelolaan limbah ramah lingkungan seperti membran filter dan bioremediasi, adanya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, adanya peluang pembinaan terhadap masyarakat termasuk pelaku usaha dan home industri serta tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan.

Sedangkan nilai Indeks Tutupan Lahan realisasi sebesar 67,41 dari target 71,92 dengan capaian 93,73%. Capaian tersebut masih belum sesuai target yang telah direncanakan karena ada beberapa faktor seperti rusaknya lahan yang parah, pelanggaran tata ruang yang berulang, kesadaran pengembang masih terbatas, keterbatasan masyarakat yang masih belum merata termasuk SDM teknis, kordinasi lintas sektor yang belum optimal serta pembangunan di kawasan konservasi ataupun kawasan yang dilarang untuk dilakukan pembangunan. Meskipun terdapat faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja terdapat pula berbagai faktor pendukung yang berperan penting terkait realisasi tersebut seperti manfaat ekologis yang terukur terhadap tutupan lahan, kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian ruang, ketersediaan teknologi untuk pemantauan, partisipasi masyarakat yang mulai tumbuh, dukungan organisasi maupun komunitas lingkungan seta dukungan regulasi perlindungan sumberdaya air yang berpengaruh terhadap perubahan tutupan lahan.

Sasaran 3 Yakni Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan digambarkan dengan indeks kewaspadaan nasional, dimana realisasi dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 3.7:

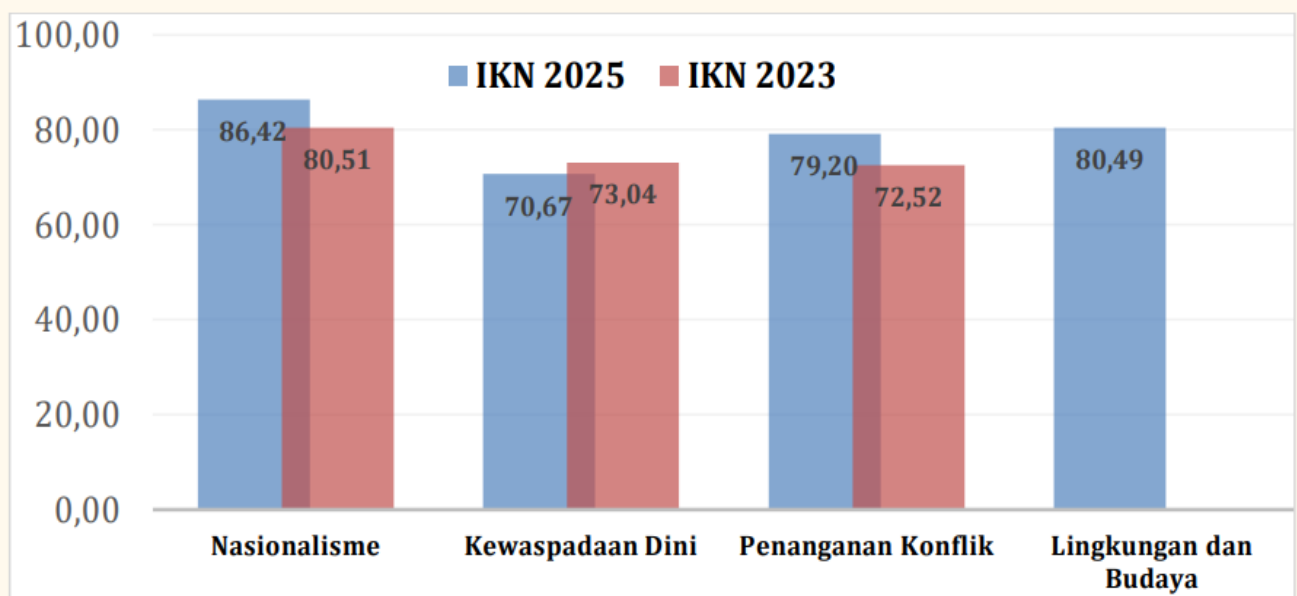
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks Kewaspadaan Nasional	63	77,14	122,44

Berdasarkan Tabel 3.7, terlihat bahwa indeks kewaspadaan nasional dengan target 63 dengan realisasi 77,14 dan mendapatkan capaian 122,44%. Capaian ini tidak lepas dari setiap laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada tertangani secara tuntas. Gerak cepat untuk penanganan laporan gangguan keamanan dan ketertiban melalui pembentukan Satgas Reaksi Cepat, pembentukan satgas Pancasila, keterlibatan tokoh

agama dan tokoh masyarakat, serta peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama, Forkopimda, dan lembaga adat. Masyarakat Kota Palu sangat heterogen, namun sangat terbuka dengan perbedaan. Selain itu peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sangat optimal dalam menegakkan peraturan daerah dan upaya pelaksanaan tugas pengamanan sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, masyarakat masih menjalankan adat kebiasaan para leluhur yang masih tetap dilestarikan di wilayah Kelurahan yang merupakan kearifan lokal.

Gambar 9: Garfik Perbandingan Capaian Indeks Dimensi IKN Kota Palu Tahun 2023 dan Tahun 2025



Gambar 3.5 Perbandingan Capaian Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Kota Palu Tahun 2023 dan 2025

Perbandingan skor menunjukkan beberapa dinamika penting. Dimensi Nasionalisme mengalami peningkatan signifikan dari 80,51 menjadi 84,02, mencerminkan penguatan identitas kebangsaan, kohesi sosial, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas yang memperkuat jati diri nasional. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan berbagai kegiatan pembinaan dan edukasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta penguatan peran institusi formal dan nonformal dalam internalisasi nilai kebangsaan dan kewaspadaan nasional.

Sementara itu, dimensi Lingkungan dan Budaya mulai diukur pada 2025 dengan skor 80,49, menunjukkan kekuatan modal sosial-budaya dan tingginya perilaku kolektif warga dalam menjaga lingkungan dan mendukung kegiatan budaya lokal. Namun demikian, laporan ini juga mencatat penurunan pada Dimensi Kewaspadaan Dini dari 73,04 pada 2023 menjadi 70,21 pada 2025. Penurunan ini menunjukkan melemahnya kapasitas deteksi dan respon dini terhadap ancaman seperti penyebaran hoaks, dinamika keamanan lokal, serta kasus penyalahgunaan narkoba. Secara umum, hasil analisis perbandingan ini menggambarkan bahwa IKN Kota Palu berada dalam tren positif, didorong oleh penguatan identitas kebangsaan, peningkatan kapasitas penanganan konflik, serta pemanfaatan modal budaya dan kearifan lokal. Meski demikian, penurunan pada aspek kewaspadaan dini menunjukkan perlunya revitalisasi sistem *early warning*, peningkatan literasi digital, penguatan mekanisme pelaporan di tingkat RT/RW, serta penguatan kolaborasi aparat dan komunitas dalam mencegah munculnya ancaman sosial. Dengan demikian, meskipun capaian IKN Kota Palu mengalami peningkatan hingga mencapai 77,14 pada tahun 2025, perhatian khusus dan tindak lanjut strategis perlu diberikan pada dimensi Kewaspadaan Dini agar ketahanan sosial masyarakat dapat semakin diperkuat dan stabilitas kota tetap terjaga secara berkelanjutan.



Gambar 3.6 Penertiban Polisi Pamong praja



Gambar. 3.7 Lembaga Adat di Kota Palu

Sasaran 4 Yakni Meningkatkan Infrastruktur yang Berketahanan.

Sasaran strategis meningkatnya infrastruktur yang berketahanan memiliki tiga indikator kinerja yaitu persentase jalan yang berkeselamatan, persentase luas kawasan kumuh, dan persentase rumah tidak layak huni. Realisasi dan capaian ketiga indikator tersebut terlihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Meningkatkan Infrastruktur yang berketahanan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase jalan yang berkeselamatan	8,38	9,23	110,14
2.	Persentase luas kawasan kumuh	0,03	0,21	-500
3.	Persentase rumah tidak layak huni	1,1	1,43	70

Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan dapat dilihat pada Tabel 3.8, indikator kinerja persentase jalan yang berkeselamatan dengan target 8,38% realisasi sebesar 9,23% serta capaian 110,14%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palu dalam penyediaan jalan yang memenuhi standar keselamatan melampaui target yang telah ditetapkan dan berada pada kategori sangat baik. Capaian tersebut telah memenuhi target RPJMD, Faktor Pendukung Keberhasilan diantaranya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Perbaikan dan pemeliharaan jalan dilakukan secara konsisten, Penyediaan fasilitas keselamatan seperti rambu lalu lintas, marka

jalan, dan penerangan jalan. demikian juga adanya Sinergi Antar Perangkat Daerah, Koordinasi antara dinas teknis (PUPR, Perhubungan) berjalan efektif, Dukungan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi serta Dukungan Program Keselamatan Lalu Lintas yakni Sosialisasi keselamatan jalan kepada masyarakat dan Penataan kawasan rawan kecelakaan (blackspot).

sedangkan untuk persentase luas kawasan kumuh dengan target 0,03% dengan realisasi sebesar 0,21% dan memiliki capaian sebesar -500% pada tahun ini karena dalam pelaksanaannya target pengurangan kawasan kumuh justru meleset cukup jauh, atau bahkan terjadi perluasan kawasan kumuh baru yang tidak terprediksi. Pencapaian indikator persentase luas kawasan kumuh didukung dengan Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui kolaborasi penanganan dan kesamaan program kegiatan penanganan kawasan kumuh dari kegiatan teknokrat dan aspirasi masyarakat, Penanganan infrastruktur berskala Kawasan dan terintegrasi, dan pelaksanaan program penataan kawasan kumuh, alokasi anggaran difokuskan pada penanganan kawasan kumuh, rehabilitasi jalan dan drainase lingkungan perbaikan sanitasi dan air minum dalam satu lokus yang sama agar pemenuhan 7 indikator kumuh dapat terpenuhi sekaligus untuk menghapus status kumuh di lokasi tersebut. Selain itu juga Pemerintah Kota Palu dibantu oleh Kementerian PUPR melalui program Kotaku untuk pembangunan beberapa infrastuktur yang ada di Kota Palu.

Selanjutnya, untuk persentase rumah tidak layak huni dengan target 1,1 dan realisasi 1,43% dengan nilai capaian 70% Secara matematis capaian menunjukkan melampaui target, namun karena indikator ini bersifat negatif (semakin kecil semakin baik), maka capaian tersebut justru mengindikasikan kinerja yang belum optimal. Secara substantif kinerja yang belum optimal terjadi karena realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan RTLH belum mampu menekan jumlah rumah tidak layak huni sesuai dengan target kinerja yang diharapkan. hal ini karena jumlah RTLH yang masih cukup tinggi, keterbatasan anggaran Pertumbuhan Permukiman Tidak Terencana, Munculnya kawasan kumuh baru dan belum optimalnya integrasi lintas sektor (perumahan, sosial, lingkungan) dan perlunya pemutahiran data RTLH.

Sasaran 5 Yakni Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran strategis meningkatnya kualitas SDM ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target IPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu untuk Tahun 2025 sebesar 82,40 dengan realisasi 84,12 dan capaiannya sebesar 102,46%. Capaian tersebut, dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks pembangunan manusia	84,37	84,53	100,19%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 di Kota Palu mencapai 84,53, mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 84,12. Peningkatan IPM ini dipengaruhi oleh perbaikan pada dimensi pembentuknya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

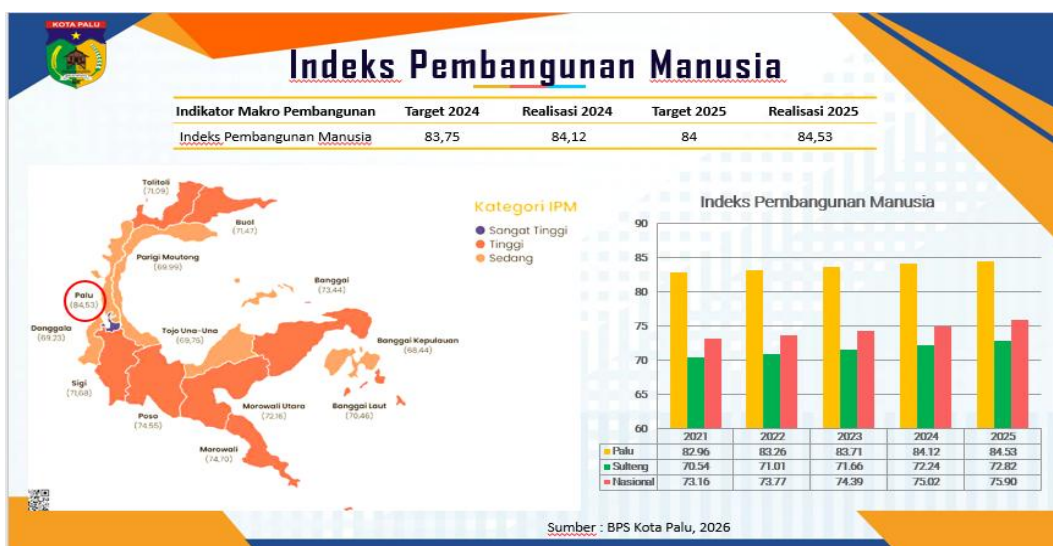
Pada dimensi kesehatan, peningkatan terlihat dari bertambahnya umur harapan hidup masyarakat. Peningkatan dimensi kesehatan dimulai dari tersedianya fasilitas kesehatan serta pelaksanaan program promotif dan preventif turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui program Palu Kota Sehat, BPJS gratis bagi warga tidak mampu, peningkatan kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta peningkatan pelayanan kesehatan baik promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk jaminan kesehatan masyarakat, pencapaian Kota Palu dari dimensi kesehatan dapat terlihat dengan diraihnya predikat Kota Sehat pada Tahun 2023 dengan kategori Swasti Saba Padapa kemudian mendapatkan penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 Kota Palu kembali meraih penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC).

Pada dimensi pendidikan, terjadi peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mencerminkan semakin baiknya akses dan partisipasi pendidikan. Peningkatan dimensi ini didukung oleh bantuan pendidikan dan peningkatan sarana prasarana, berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah seperti melalui program percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu, Biaya sekolah SD dan SMP negeri gratis, bantuan peralatan sekolah bagi siswa tidak

mampu, beasiswa S-1 bagi siswa tidak mampu, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, layanan bus sekolah gratis, peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan diantaranya melalui magang kepala sekolah serta adanya program bus sekolah gratis untuk PAUD hingga Mahasiswa.

Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak terjadi peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari daya beli masyarakat yang tercermin dalam pengeluaran riil per kapita. Peningkatan dimensi ekonomi dilaksanakan dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong daya beli melalui pemberian bantuan modal usaha, penguatan UMKM, bantuan peralatan usaha, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta fasilitasi dalam pengurusan izin usaha baik terkait izin halal maupun P-IRT.

Secara garis besar capaian IPM Kota Palu tahun 2025 menunjukkan kinerja pembangunan manusia yang positif dan berkelanjutan. Namun demikian, capaian ini bukan tanpa hambatan dalam pelaksanaan meningkatkan Indeks pembangunan manusia. Ada beberapa faktor yang dianggap menjadi penghambat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Palu seperti Masih adanya perbedaan capaian pembangunan manusia antara wilayah perkotaan dan pinggiran, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan, perbedaan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana mempengaruhi hasil pendidikan, dan sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara merata.



Gambar 3.8 Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran 6 Yakni Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ditunjukkan dengan indikator angka kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Palu turun di Tahun 2025 dari target 4,50% dengan realisasi sebesar 5,26%. Realisasi dan capaian indikator ini disajikan pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

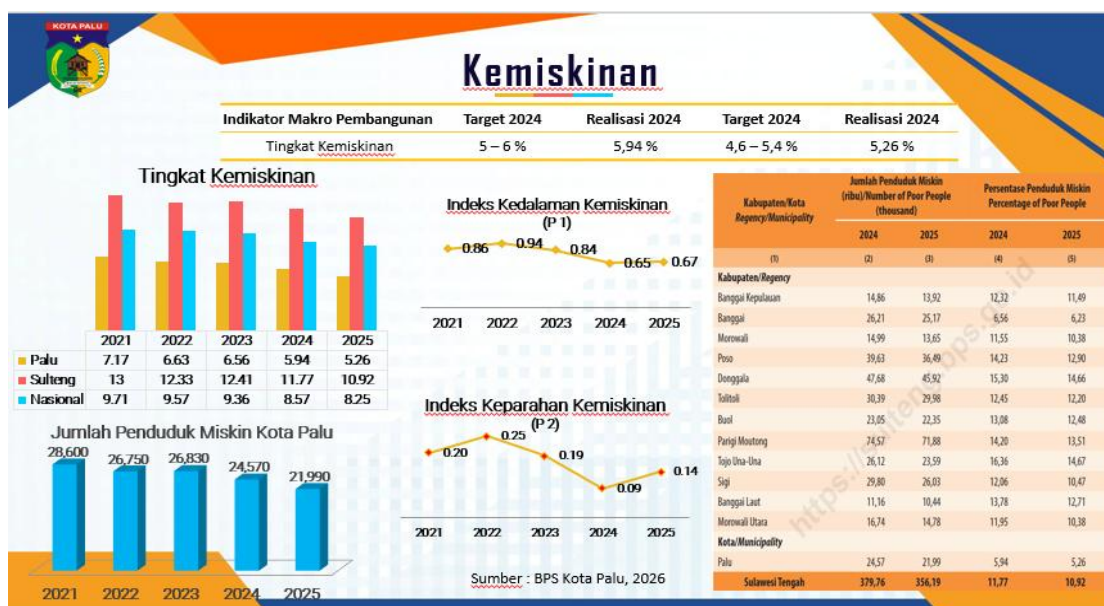
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Angka Kemiskinan	4,75	5,26	89,26

Tabel diatas menunjukkan realisasi indikator angka kemiskinan di Tahun 2025 dengan target 4,75 dan realisasi tahun 2025 adalah 5,26 dengan capaian 89,26%. menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan berjalan cukup baik. Secara konseptual, angka kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat serta membaiknya akses terhadap layanan dasar. capaian tersebut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro daerah, efektivitas program perlindungan sosial, serta intervensi sektoral yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dicapai melalui program bantuan modal usaha perkelurahan, BPJS kesehatan gratis warga tidak mampu, BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya, Penguatan UMKM, bantuan perahu dan alat tangkap ikan untuk nelayan Kota Palu, bantuan *Bioflok* untuk pengembangan perikanan budidaya, bantuan sarana produksi hortikultura, bantuan benih dan pupuk untuk tanaman pangan, bantuan bibit ternak sapi, kambing dan domba, bantuan benih dan bibit untuk pemanfaatan pekarangan, beasiswa bagi keluarga tidak mampu, dan Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi serta berfokus pada program yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya penurunan angka kemiskinan juga memiliki kendala dalam penurunannya seperti masyarakat berada pada kategori rentan miskin yang mudah terdampak oleh guncangan ekonomi, seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, isparitas pembangunan antarwilayah menyebabkan distribusi manfaat pembangunan belum merata, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal, isparitas pembangunan antarwilayah menyebabkan distribusi manfaat pembangunan belum

merata, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal, ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan sosial dapat menghambat kemandirian ekonomi masyarakat, dan Tekanan inflasi, fluktuasi harga komoditas, dan kondisi ekonomi global turut memengaruhi daya beli masyarakat.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan guna mempercepat turunnya angka kemiskinan yakni perlunya Perbaikan Target Program melalui Pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan akurat, Penguatan Program Pemberdayaan Ekonomi, Fokus pada peningkatan pendapatan (UMKM, padat karya, pelatihan kerja), integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan yakni sinkronisasi lintas OPD dan dengan pemerintah pusat, dan Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta Pendekatan Berbasis Wilayah yakni Intervensi pada kantong-kantong kemiskinan. walaupun pemerintah Kota Palu telah melakukan upaya penunjang guna menurunkan angka kemiskinan seperti melakukan verifikasi dan validasi DTKS/P3KE mulai dari tingkat kelurahan, dan melakukan pendampingan bagi masyarakat yang menerima bantuan.



Gambar 3.9 Realisasi Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2025

Sasaran 7 Yakni Meningkatnya Pengembangan Karakter Berdasarkan Nilai Keagamaan, Kearifan Lokal dan Kebangsaan.

Sasaran strategis meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan digambarkan melalui indikator Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP). Adapun pencapaian indikator kinerja tersebut dapat lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Karakter Berdasarkan Nilai Keagamaan, Kearifan Lokal, Dan Kebangsaan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks Aktualisasi Pancasila	84	78,81	93,82

Sumber : BPS Kota Palu, 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2025, Realisasi capaian indeks aktualisasi Pancasila sebesar 78,81 dari target yang ditetapkan sebesar 84 sehingga nilai capaian kinerja yang diperoleh yakni 93,82%.

Capaian Indeks Aktualisasi Pancasila Kota Palu Tahun 2025 sebesar 93,82% menunjukkan kinerja yang baik, namun belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila telah berjalan cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan pemahaman, adaptasi terhadap perkembangan digital, serta peningkatan kualitas program berbasis hasil. Capaian ini didukung oleh adanya nota kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) antara Pemerintah Kota Palu dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Selain itu, sebagai upaya dalam pencapaian target indikator ini dilakukan berbagai program di antaranya pembentukan satgas Pancasila, peningkatan peran lembaga adat, pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Paskibraka, pendidikan PIP bagi guru, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan semua komponen masyarakat di Kota Palu.

Sasaran 8 Yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan diukur melalui indikator indeks reformasi birokrasi dan opini BPK. Realisasi dan capaian indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80	74,16*	92,70
2.	Opini BPK	WTP	WTP	100

Ket: tanda *) masih menggunakan nilai lama karena nilai terbaru belum keluar

Pencapaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB pada tahun 2025 belum keluar sehingga masih menggunakan penilaian Tahun 2024 indeks RB 74,16 tetapi tetap menggunakan target tahun 2025 sebesar 90 sehingga memperoleh capaian realisasi sebesar 92,70% dan mendapatkan predikat BB atau kategori baik. Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2023 nilai indeks reformasi birokrasi adalah 64,19. Peningkatan nilai ini didukung oleh kinerja seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Palu dalam upaya memperbaiki indikator pencapaian reformasi birokrasi, baik dalam reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik. berjalan cukup efektif, khususnya dalam aspek akuntabilitas kinerja, penataan organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, nilai tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar komponen reformasi birokrasi telah diimplementasikan, seperti: Penataan regulasi dan penyederhanaan proses bisnis, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Penguatan sistem pengawasan internal, pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Namun demikian, nilai 74,13 juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang perlu menjadi perhatian, terutama pada aspek:

Manajemen perubahan, yang belum sepenuhnya mendorong budaya kerja yang adaptif dan berorientasi hasil, Penataan tatalaksana, khususnya dalam optimalisasi digitalisasi proses pemerintahan, Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang masih perlu didorong agar lebih responsif dan inovatif, Penguatan zona integritas, terutama dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi.

Realisasi ini belum mencapai target dalam RPJMD sehingga masih perlu upaya perbaikan- perbaikan guna meningkatkan nilai reformasi birokrasi sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Walaupun penilaian Reformasi birokrasi telah menerapkan reformasi birokrasi berdampak yaitu reformasi birokrasi General dan Tematik.

Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada gambar yang dilampirkan di bawah ini:

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu

RB General Awal	63.07
RB General	63.07
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	63.07
RB Tematik	10.96
Indeks RB	74.16

Tabel 3.13 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 2025

Hasil evaluasi indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Palu di Tahun 2025 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya 100% predikat sangat tinggi. Pemerintah Kota Palu telah memperoleh predikat WTP selama 12 kali berturut-turut sejak Tahun 2014. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kota Palu sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Palu. Predikat WTP ini dipertahankan melalui peran serta BPKAD dan seluruh OPD dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sub bab ini menyajikan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Daerah Kota Palu. Analisis dilakukan secara komprehensif untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta kontribusi masing-masing program dan kegiatan terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, sub bab ini juga mengidentifikasi berbagai faktor pendukung yang mendorong keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan belum optimalnya capaian kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 3.14. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	IKU DAN PROGRAM	PROGRAM	ALASAN MENGAPA PROGRAM/KEGIATAN TERSEBUT MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terbukti berperan penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Kota Palu, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah. Namun, diperlukan penguatan pada aspek SDM, infrastruktur, dan promosi agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Kota Palu telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, diperlukan upaya penguatan pada aspek infrastruktur, pengelolaan, dan promosi agar potensi pariwisata dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

		Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata di Kota Palu telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan citra dan kunjungan wisatawan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek strategi pemasaran digital, branding, dan evaluasi berbasis data. Dengan optimalisasi tersebut, program ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing pariwisata.
Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi di Kota Palu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Meskipun telah berjalan cukup baik, diperlukan penguatan pada aspek tindak lanjut hasil penilaian, kapasitas SDM, dan sistem pengawasan agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kinerja koperasi dan kesejahteraan masyarakat.
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di Kota Palu memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan koperasi. Meskipun telah berjalan cukup baik, diperlukan penguatan pada aspek cakupan pengawasan, kapasitas SDM, serta sistem pengawasan berbasis risiko agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam meningkatkan kinerja koperasi dan melindungi kepentingan anggota.
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh) di Kota Palu pada dasarnya merupakan program yang sangat relevan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, serta keberlanjutan pendampingan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kapasitas pelaku usaha, keterbatasan akses modal, serta belum optimalnya integrasi program lintas sektor, yang menyebabkan capaian kinerja belum sepenuhnya optimal.
		Program Pengembangan Umkm	Program Pengembangan UMKM pada dasarnya memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kemampuan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta dukungan akses pasar dan pembiayaan. Namun, keterbatasan kapasitas pelaku usaha, rendahnya adopsi digital, dan belum optimalnya pendampingan menjadi faktor utama yang menyebabkan capaian

			program belum maksimal.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat pengangguran. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, kualitas pelaksanaan, serta dukungan kemitraan dengan dunia usaha. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas, belum optimalnya penyaluran tenaga kerja, serta rendahnya relevansi pelatihan yang menyebabkan capaian program belum sepenuhnya optimal.
	Program Penempatan Tenaga Kerja		Program Penempatan Tenaga Kerja memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran melalui peningkatan efektivitas pasar kerja. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi lowongan kerja, kesesuaian kompetensi tenaga kerja, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti mismatch kompetensi, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya partisipasi perusahaan, yang menyebabkan capaian program belum sepenuhnya optimal.
	Program Hubungan Industrial		Program Hubungan Industrial memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas hubungan kerja dan mendukung produktivitas tenaga kerja. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas lembaga hubungan industrial, serta peran aktif pemerintah dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman para pihak, lemahnya fungsi kelembagaan, dan keterbatasan pengawasan, yang menyebabkan capaian program belum sepenuhnya optimal.
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan investasi daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemudahan layanan, integrasi sistem, serta tingkat kesadaran pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha, gangguan sistem, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.

	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan berperan penting dalam mendukung kelancaran arus barang, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi daerah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur distribusi yang memadai, efisiensi sistem logistik, serta dukungan konektivitas wilayah. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana, tingginya biaya distribusi, dan belum optimalnya koordinasi antar pelaku distribusi, yang menyebabkan capaian program belum maksimal. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas intervensi pemerintah melalui operasi pasar dan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pasokan, gangguan distribusi, dan praktik spekulasi harga, yang menyebabkan stabilisasi harga belum sepenuhnya optimal. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, kualitas, dan keadilan dalam perdagangan barang dan jasa. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar, efektivitas pengawasan, serta kesadaran konsumen. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan minimnya partisipasi masyarakat, yang menyebabkan capaian program belum sepenuhnya optimal. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri dan peningkatan nilai tambah produk. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh perencanaan yang tepat, dukungan infrastruktur, serta kemudahan investasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya investasi, dan belum optimalnya hilirisasi produk, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
--	--	--

		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri memiliki peran penting dalam menciptakan tertib usaha dan memastikan kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan, integrasi sistem perizinan, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku industri, dan belum optimalnya integrasi data, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional memiliki peran strategis dalam menyediakan data industri yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kepatuhan pelaku industri dalam pelaporan, kualitas sistem informasi, serta kapasitas SDM pengelola. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi pelaporan, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya integrasi data, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya promosi investasi, serta koordinasi antar instansi yang belum maksimal, yang menyebabkan capaian program belum sepenuhnya optimal.
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki peran penting dalam memastikan investasi yang masuk dapat terealisasi secara optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas monitoring, kepatuhan pelaporan investor, serta koordinasi antar instansi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan pelaporan, keterbatasan pengawasan, dan hambatan teknis investasi, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.

Kawasan Ekonomi Khusus	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam menarik minat investor dan meningkatkan realisasi investasi daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas informasi investasi, strategi promosi yang tepat, serta efektivitas tindak lanjut. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya promosi berbasis data, dan kurangnya tindak lanjut hasil promosi, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investasi ke daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas pelayanan terpadu, kecepatan proses, serta pemanfaatan sistem digital. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti hambatan teknis sistem, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya koordinasi antar instansi, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berperan krusial dalam memastikan bahwa investasi yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh efektivitas monitoring, kepatuhan pelaporan LKPM, serta kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan hambatan investasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaporan, dan hambatan teknis di lapangan, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan investasi. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas data, kepatuhan pelaporan pelaku usaha, serta efektivitas sistem informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan pelaporan, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya integrasi data, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran fundamental dalam mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, serta kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang belum merata, dan belum optimalnya koordinasi serta sistem monitoring, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investasi ke daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas PTSP, kecepatan layanan, serta pemanfaatan sistem digital. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti hambatan teknis sistem, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data investasi yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kepatuhan pelaporan pelaku usaha, kualitas sistem informasi, serta kapasitas SDM pengelola. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan pelaporan, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya integrasi serta pemanfaatan data, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran fundamental sebagai enabler dalam mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang belum merata, serta belum optimalnya koordinasi dan sistem monitoring, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh keberlanjutan sumber daya ikan, ketersediaan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas nelayan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti kondisi cuaca, keterbatasan sarana, dan tingginya biaya operasional, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.

		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi perikanan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana produksi, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas pembudidaya. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti serangan penyakit, tingginya biaya produksi, dan keterbatasan akses pasar, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas produk, ketersediaan sarana pengolahan, serta akses pasar yang luas. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya standar mutu, dan terbatasnya jaringan pemasaran, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana produksi yang berkualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta kemampuan petani dalam memanfaatkannya. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterlambatan distribusi, keterbatasan sarana, dan belum optimalnya pemanfaatan alsintan, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, perencanaan yang tepat, serta pemeliharaan yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kerusakan infrastruktur, dan belum optimalnya koordinasi, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian memiliki peran penting dalam menciptakan tertib usaha dan mendukung pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemudahan layanan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta efektivitas sosialisasi dan pendampingan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, kendala teknis sistem, dan persepsi proses yang rumit, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.

		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, ketersediaan pangan, serta efektivitas distribusi dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti akurasi data, keterbatasan anggaran, dan fluktuasi harga pangan, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak aman serta meningkatkan kualitas kesehatan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, serta dukungan sarana dan SDM. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pengawasan, rendahnya kepatuhan, dan kurangnya fasilitas pengujian, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit dan pangan asal hewan yang tidak aman. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas pengendalian penyakit, ketersediaan tenaga dan sarana, serta kesadaran peternak dan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan potensi wabah penyakit, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas petani dan mendorong adopsi teknologi pertanian. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas penyuluh, relevansi materi, serta partisipasi petani. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan penyuluh, rendahnya frekuensi kegiatan, dan kurangnya sarana pendukung, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh pemanfaatan pangan lokal, edukasi pola konsumsi, serta partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya perubahan pola konsumsi, keterbatasan sarana, dan belum optimalnya keberlanjutan program, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.

2	Indeks Risiko Bencana Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan tertata. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, konsistensi pemanfaatan ruang, serta efektivitas pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti pelanggaran tata ruang, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran krusial sebagai fondasi dalam mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang belum merata, serta belum optimalnya koordinasi dan monitoring, yang berdampak pada belum maksimalnya capaian program.
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung memiliki peran strategis dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai peruntukan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat, efektivitas pengawasan, serta dukungan sistem perizinan dan SDM teknis. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan, keterbatasan pengawasan, dan kendala teknis sistem, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat, efektivitas mediasi, serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti kompleksitas sengketa, keterbatasan kewenangan, dan kurangnya kesepakatan antar pihak, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pembangunan serta menjaga stabilitas sosial. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kejelasan status tanah, keadilan dalam penilaian ganti rugi, serta efektivitas koordinasi antar pihak. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti ketidakjelasan kepemilikan, keterbatasan

			anggaran, dan perbedaan persepsi nilai ganti rugi, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah memiliki peran strategis dalam menciptakan pemanfaatan lahan yang tertib, optimal, dan berkelanjutan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat, kesesuaian dengan tata ruang, serta efektivitas pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti ketidaklengkapan data, pelanggaran pemanfaatan tanah, dan belum optimalnya pengawasan, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran memiliki peran vital dalam melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalisir kerugian akibat kejadian darurat. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kecepatan respons, ketersediaan sarana, serta kapasitas SDM. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan armada, jangkauan layanan, dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang belum merata, serta belum optimalnya koordinasi dan monitoring, yang berdampak pada belum maksimalnya capaian program.
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana memiliki peran vital dalam melindungi masyarakat dan meminimalisir dampak bencana. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan, ketersediaan sarana prasarana, kapasitas SDM, serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana, kesiapsiagaan yang belum merata, dan sistem peringatan dini yang belum optimal, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.

3	Dinas Pekerjaan Umum Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran,
		Program Penataan Bangunan Gedung	kualitas SDM yang belum merata, serta belum optimalnya koordinasi dan monitoring, yang berdampak pada belum maksimalnya capaian program. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki peran strategis dalam mewujudkan bangunan yang tertib, aman, dan sesuai peruntukan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat, efektivitas pengawasan, serta dukungan regulasi dan SDM teknis. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan, keterbatasan pengawasan, dan kendala teknis sistem, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, ketersediaan data, serta integrasi dengan kebijakan pembangunan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan data, dokumen yang belum mutakhir, dan koordinasi yang belum optimal, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, serta penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, sarana pemantauan, dan rendahnya kepatuhan, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan data, upaya konservasi, serta partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih

		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	terdapat kendala seperti keterbatasan data, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang menyebabkan capaian program belum maksimal. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh efektivitas pembinaan, intensitas pengawasan, serta dukungan SDM dan sistem informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya penegakan hukum, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas edukasi, partisipasi masyarakat, serta dukungan SDM dan media. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi, keterbatasan frekuensi kegiatan, dan dukungan sumber daya, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.
4	Indeks Kewaspadaan Nasional	Program Pengelolaan Persampahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Persampahan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana, efektivitas sistem pengelolaan, serta partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan armada, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kapasitas TPA yang terbatas, yang menyebabkan capaian program belum maksimal. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang belum merata, serta belum optimalnya koordinasi dan monitoring, yang menyebabkan capaian program belum maksimal.

Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu program strategis pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas masyarakat. Program ini umumnya dilaksanakan melalui kegiatan penegakan peraturan daerah, pengawasan ketertiban umum, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program ini terbukti berhasil meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran politik yang sehat. Keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya kapasitas kader partai, kesadaran etika politik masyarakat, dan penguatan budaya politik yang demokratis. Ke depan, keberlanjutan program ini akan lebih optimal dengan peningkatan monitoring, inovasi metode pendidikan politik, serta sinergi antara pemerintah, partai politik, dan lembaga pendidikan. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas organisasi, mendorong partisipasi sosial, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur. Namun, kegagalan atau hambatan muncul pada aspek keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap regulasi, koordinasi antar lembaga, dan evaluasi dampak jangka panjang
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program ini berhasil dalam membangun ketahanan masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat kohesi sosial, dan melestarikan budaya lokal. Namun, hambatan muncul pada keterbatasan sumber daya, partisipasi yang tidak merata, dan monitoring yang kurang optimal. Keberhasilan Program Ketahanan Ekonomi Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pembinaan UMKM, dan fasilitasi akses permodalan berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Adanya bimbingan teknis dan pendampingan usaha mendukung stabilitas ekonomi lokal dan mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial. Ketahanan Sosial Kegiatan pembinaan sosial, seperti sosialisasi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kegiatan kemasyarakatan, berhasil meningkatkan kohesi sosial dan solidaritas antarwarga. Penanganan isu sosial sensitif melalui forum diskusi dan mediasi menurunkan potensi konflik dan meningkatkan kualitas interaksi sosial. Ketahanan Budaya Pelestarian budaya lokal, penyelenggaraan kegiatan seni, serta pendidikan budaya di

			sekolah dan masyarakat mendukung penguatan identitas budaya dan nilai-nilai lokal. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya meningkat, menandakan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pelestarian nilai budaya. Sinergi Program Integrasi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu program memungkinkan efek sinergis, misalnya pemberdayaan ekonomi berbasis budaya lokal (kerajinan, seni, kuliner), yang sekaligus memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan.
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat mekanisme mediasi, dan menurunkan potensi eskalasi konflik sosial. Namun, hambatan muncul pada keterbatasan sumber daya, partisipasi masyarakat yang belum merata, dan monitoring yang kurang kuantitatif. Keberhasilan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Sosialisasi dan edukasi mengenai potensi risiko sosial, politik, dan keamanan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewaspadaan dan tanggung jawab sosial. Terbentuknya forum komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Penanganan Konflik Sosial Fasilitasi mediasi dan penyelesaian konflik berbasis masyarakat berhasil menurunkan eskalasi perselisihan, terutama konflik sosial berskala lokal seperti sengketa tanah, perselisihan antar kelompok masyarakat, dan isu pemukiman. Peningkatan kapasitas aparat penanganan konflik melalui pelatihan dan simulasi skenario konflik sosial meningkatkan responsivitas dan kualitas intervensi. Koordinasi Lintas Sektor Sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memungkinkan penanganan konflik lebih cepat dan tepat sasaran. Pemanfaatan data sosial dan laporan masyarakat (early warning system) membantu mengantisipasi potensi konflik sebelum meluas.

5	Persentase Jalan yang Berkeselamatan Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	Keberhasilan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Implementasi rambu lalu lintas, marka jalan, dan pengawasan kepatuhan pengguna jalan menurunkan tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di beberapa ruas jalan strategis. Program sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah dan masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan. Pengaturan dan Penertiban Angkutan Jalan Penataan trayek angkutan umum dan pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang telah memperbaiki keteraturan operasional transportasi. Terdapat peningkatan kepatuhan operator angkutan terhadap peraturan keselamatan, izin trayek, dan standar kendaraan. Pengembangan Infrastruktur Perbaikan jalan, fasilitas halte, dan penerangan jalan umum meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur mendukung kelancaran arus lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan meminimalisasi potensi kecelakaan. Dampak Sosial dan Ekonomi Transportasi yang lebih tertib dan aman meningkatkan mobilitas masyarakat, efisiensi angkutan barang, serta mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Peningkatan kualitas jalan melalui perbaikan dan pengaspalan jalan utama dan pemukiman berhasil mengurangi kerusakan jalan dan memperlancar arus lalu lintas. Peningkatan daya tahan jalan melalui penerapan standar konstruksi dan material yang baik meminimalkan kerusakan berulang. Perluasan Jaringan Jalan Pembangunan jalan baru di wilayah strategis meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan membuka wilayah ekonomi baru. Jalan penghubung antar-kecamatan dan akses ke fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit semakin baik. Pemeliharaan dan Perawatan Rutin Program pemeliharaan berkala, seperti penambalan jalan berlubang, perbaikan drainase, dan pembersihan bahu jalan, meningkatkan umur jalan dan kenyamanan pengguna jalan.
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Keberhasilan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Konstruksi Pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis bagi tenaga konstruksi meningkatkan kompetensi SDM, terutama pada bidang teknik, manajemen proyek, dan keselamatan kerja. Tenaga kerja yang bersertifikat mendorong profesionalisme dan

6	Persentase Rumah tidak layak huni	Program Pengembangan Perumahan	standar kualitas yang lebih tinggi pada proyek konstruksi. Standarisasi dan Kualitas Proyek Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi memastikan standar teknis, keamanan, dan kualitas bangunan terpenuhi. Implementasi prosedur pengadaan dan konstruksi yang transparan mengurangi risiko proyek gagal atau tidak sesuai spesifikasi. Peningkatan Partisipasi Usaha Konstruksi Lokal Program mendorong pengusaha lokal untuk ikut serta dalam proyek pembangunan, sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesempatan kerja. Kemitraan dengan pelaku jasa konstruksi lokal mendorong pertumbuhan industri konstruksi di wilayah kota. Dampak terhadap Pembangunan Infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun melalui jasa konstruksi yang terlatih dan berkualitas meningkatkan daya tahan, keselamatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas sektor konstruksi mendukung percepatan pembangunan fasilitas publik, jalan, gedung, dan sarana sosial.
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		Peningkatan Akses Perumahan Layak Huni Pembangunan perumahan baru, baik melalui program pemerintah maupun kerjasama dengan swasta, telah meningkatkan ketersediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program subsidi perumahan dan fasilitas KPR bersubsidi membantu masyarakat memperoleh rumah dengan biaya terjangkau.
7	Persentase Luas Kawasan Kumuh		
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman berhasil meningkatkan keteraturan, kualitas infrastruktur, dan kenyamanan lingkungan permukiman, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Namun, hambatan muncul pada keterbatasan anggaran, lahan, partisipasi masyarakat, dan pemeliharaan infrastruktur.
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Keberhasilan Program Pengurangan Permukiman Kumuh Program berhasil mengidentifikasi dan memetakan lokasi permukiman kumuh, sehingga rehabilitasi dan relokasi dapat dilakukan secara terencana. Renovasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah baru meningkatkan jumlah hunian layak huni bagi masyarakat miskin. Peningkatan Infrastruktur Pendukung

			Penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, listrik, dan akses jalan lingkungan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur tambahan, seperti taman lingkungan, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau, meningkatkan kenyamanan dan estetika kawasan permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, drainase, taman, dan fasilitas publik lainnya meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat. Penerangan jalan dan sarana keamanan publik mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Pemeliharaan dan Keberlanjutan Infrastruktur Program pemeliharaan rutin fasilitas umum berhasil mengurangi kerusakan dan memperpanjang umur pakai infrastruktur. Monitoring dan pemeliharaan fasilitas PSU meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Kegagalan / Kendala Program Keterbatasan Anggaran dan SDM Anggaran yang terbatas mempengaruhi cakupan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas PSU di seluruh wilayah kota. Keterbatasan tenaga teknis dan operasional mempengaruhi kualitas dan kecepatan pemeliharaan. Pemeliharaan Infrastruktur Beberapa fasilitas yang dibangun atau diperbaiki tidak terpelihara dengan baik karena minimnya mekanisme perawatan jangka panjang. Partisipasi Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas umum mengurangi efektivitas program. Tantangan Teknis dan Lingkungan Beberapa area rawan banjir, tanah labil, atau padat penduduk memerlukan biaya lebih tinggi dan teknologi khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan PSU.
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Keberhasilan Program 1. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih - o Program distribusi dan konservasi air berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan aman. - o Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan lokal. 2. Pengendalian Banjir dan Erosi - o Pembangunan bendungan, saluran drainase, dan pengendalian aliran sungai membantu menekan risiko banjir dan erosi di wilayah rawan.

			- o Penataan kawasan tangkapan air (catchment area) menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak banjir. 3. Pelestarian dan Pengawasan Kualitas Air - o Program konservasi sumber air dan pengawasan kualitas air berhasil menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan perairan. - o Partisipasi masyarakat dalam program konservasi, seperti gerakan bersih sungai dan pengurangan pencemaran, meningkat.
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Akses Air Minum - o Pembangunan dan rehabilitasi jaringan distribusi air minum meningkatkan cakupan layanan bagi masyarakat, termasuk di daerah padat dan pinggiran kota. - o Program sambungan rumah (SR) baru mempermudah masyarakat memperoleh akses langsung ke air minum yang layak. 2. Peningkatan Kualitas Air - o Pengelolaan sumber air dan sistem distribusi dengan standar sanitasi memastikan air yang diterima masyarakat bersih, aman, dan memenuhi standar kesehatan. - o Monitoring kualitas air secara rutin mengurangi risiko penyakit akibat air dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan. 3. Modernisasi dan Pengembangan Infrastruktur - o Modernisasi instalasi pengolahan air, pompa, dan jaringan distribusi meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan kontinuitas penyediaan air minum. - o Pengembangan sistem distribusi berbasis teknologi mempermudah pemantauan dan penanganan gangguan pasokan air.
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Infrastruktur Air Limbah - o Pembangunan dan rehabilitasi jaringan SPAL berhasil meningkatkan cakupan layanan pengelolaan air limbah di wilayah perkotaan. - o Instalasi pengolahan limbah yang dibangun sesuai standar teknis mampu mengurangi pencemaran sungai dan lingkungan sekitar.

			2. Peningkatan Kualitas Lingkungan - o Program pengelolaan limbah domestik dan industri menurunkan pencemaran air dan risiko penyakit terkait sanitasi. - o Kawasan pemukiman yang tersambung dengan SPAL menunjukkan lingkungan lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. 3. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat - o Sosialisasi pengelolaan limbah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan SPAL dan pengelolaan limbah rumah tangga.
8	Indeks Pembangunan Manusia Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Infrastruktur Drainase - o Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase di kawasan padat penduduk dan strategis berhasil menurunkan genangan air dan potensi banjir. - o Drainase yang baik mendukung kelancaran arus air hujan dan menjaga kondisi jalan serta fasilitas publik tetap aman. 2. Pemeliharaan dan Keberlanjutan Sistem - o Program pemeliharaan rutin seperti pembersihan saluran dan perbaikan rutin memperpanjang umur pakai infrastruktur drainase. - o Monitoring dan perbaikan berkala meningkatkan efektivitas sistem drainase dalam mengatasi genangan air. 3. Pengelolaan Terpadu dan Dampak Lingkungan - o Integrasi drainase dengan sistem pengelolaan air limbah dan kawasan permukiman menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan nyaman.
		Program Pengelolaan Pendidikan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Mutu Pendidikan - o Pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan standar pendidikan berhasil meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kualitas pembelajaran. - o Evaluasi dan supervisi rutin mendukung peningkatan akreditasi sekolah dan pencapaian indikator pendidikan. 2. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan

			- Program pembangunan dan rehabilitasi sekolah meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil dan padat penduduk. - Pemberian bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan program inklusi mendukung pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak. 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana - Rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan fasilitas belajar mengajar (meja, kursi, laboratorium), dan teknologi pendidikan mendukung kenyamanan dan efektivitas proses belajar.
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan - Pelatihan, workshop, dan program sertifikasi meningkatkan kemampuan pedagogik, profesional, dan sosial guru. - Tenaga kependidikan memperoleh pelatihan administrasi, manajemen, dan teknis operasional sekolah yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 2. Peningkatan Profesionalisme - Sistem karier berbasis kinerja dan sertifikasi mendukung motivasi dan pengembangan karier pendidik. - Guru bersertifikat menunjukkan peningkatan kualitas pengajaran dan disiplin profesional. 3. Pemenuhan Kebutuhan SDM Pendidikan - Rekrutmen dan penempatan guru dan tenaga kependidikan di sekolah secara merata meningkatkan pemerataan layanan pendidikan. - Pengelolaan data PTK mendukung perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan secara lebih sistematis.
		Program Pengembangan Kebudayaan	Keberhasilan Program 1. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal - Program berhasil mendokumentasikan dan melestarikan warisan budaya, termasuk tarian, musik, kerajinan, bahasa, dan tradisi lokal. - Pembinaan seniman dan kelompok budaya meningkatkan kreativitas, kualitas seni, dan kontinuitas budaya lokal.

			2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat - o Festival budaya, lomba seni, dan kegiatan edukatif berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam kegiatan budaya. - o Partisipasi aktif masyarakat mendukung pelestarian budaya dan peningkatan kesadaran identitas daerah. 3. Pengembangan Infrastruktur dan Pusat Kebudayaan - o Pembangunan dan pemeliharaan gedung kesenian, galeri, dan pusat budaya mempermudah akses masyarakat terhadap kegiatan budaya. - o Fasilitas kebudayaan mendukung kegiatan seni, pendidikan budaya, dan promosi budaya lokal.
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Keberhasilan Program 1. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional - o Program berhasil mendukung kelompok seni tradisional untuk tetap eksis melalui pembinaan, pelatihan, dan dukungan teknis. - o Seni tradisional seperti tari, musik, teater, dan kerajinan lokal dilestarikan dan dipromosikan, sehingga tidak punah. 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat - o Festival, lomba, dan pertunjukan seni tradisional melibatkan masyarakat dan generasi muda, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya lokal. - o Partisipasi masyarakat membantu kontinuitas generasi penerus seniman tradisional. 3. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas - o Pusat kesenian, gedung pertunjukan, dan ruang latihan disediakan untuk mendukung kegiatan kesenian tradisional. - o Fasilitas ini meningkatkan kualitas pertunjukan dan kapasitas kelompok seni lokal.
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Layanan Kesehatan Perorangan - o Peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit mempercepat pelayanan medis bagi individu.

			- o Program imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan ibu-anak berhasil menurunkan angka kematian bayi dan ibu. 2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat - o Kampanye kesehatan, posyandu, penyuluhan gizi, dan pengendalian penyakit menular meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. - o Program sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah mendukung pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan. 3. Penguatan Tenaga Kesehatan - o Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan tenaga promosi kesehatan) meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan.
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan - o Pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjutan berhasil meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan promotif-preventif tenaga kesehatan. - o Sertifikasi dan akreditasi profesi meningkatkan profesionalisme dan standar pelayanan medis. 2. Peningkatan Profesionalisme dan Motivasi - o Program pengembangan karier berbasis kompetensi dan kinerja meningkatkan motivasi tenaga kesehatan untuk bekerja lebih produktif dan berkualitas. - o Evaluasi kinerja rutin membantu tenaga kesehatan mengetahui area perbaikan dan pengembangan. 3. Pemerataan Tenaga Kesehatan - o Penempatan dan distribusi tenaga kesehatan ke wilayah terpencil atau kurang terlayani mendukung pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Keberhasilan Program 1. Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan

			- o Pengadaan dan distribusi obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan berjalan efektif, mendukung kelancaran pelayanan medis. - o Program memastikan tersedianya obat esensial dan alat kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan klinik. 2. Pengawasan dan Mutu Produk - o Pengawasan kualitas obat, alat kesehatan, dan produk makanan/minuman mencegah peredaran barang kadaluarsa atau tidak layak konsumsi. - o Monitoring rutin terhadap fasilitas produksi dan distribusi menjaga standar keamanan dan mutu produk. 3. Dampak Kesehatan Masyarakat - o Ketersediaan obat dan alat kesehatan yang memadai mendukung pengobatan yang tepat dan pencegahan penyakit. - o Edukasi masyarakat mengenai penggunaan obat, alat kesehatan, dan konsumsi makanan yang aman meningkatkan kesadaran kesehatan. 4. Efisiensi dan Sinergi Layanan - o Integrasi pengadaan dan distribusi sediaan farmasi dengan pelayanan kesehatan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kesehatan.
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat - o Masyarakat lebih aktif mengikuti program kesehatan seperti posyandu, penyuluhan gizi, imunisasi, dan kampanye hidup sehat. - o Pembentukan kader kesehatan membantu menyalurkan informasi, melakukan monitoring, dan mendorong praktik kesehatan di tingkat komunitas. 2. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat - o Edukasi tentang sanitasi, gizi, kebersihan lingkungan, dan pencegahan penyakit menular mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat. - o Peningkatan kesadaran masyarakat berkontribusi menurunkan angka penyakit yang dapat dicegah. 3. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

			- o Penyuluhan mengenai manfaat KB, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur. - o Partisipasi masyarakat, termasuk melalui kader KB dan tokoh masyarakat, meningkat dalam mendukung program KB. 3. Penguatan Kelembagaan dan SDM - o Tenaga kesehatan dan penyuluh KB mendapatkan pelatihan dan pendampingan sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. - o Integrasi program KB dengan program kesehatan ibu-anak, gizi, dan pendidikan memperkuat sinergi antar sektor.
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kapasitas Keluarga - o Pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan hidup meningkatkan kemampuan keluarga untuk mandiri. - o Pendampingan keluarga berisiko sosial atau ekonomi memberikan bimbingan dalam perencanaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup. 2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga - o Program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan kelompok usaha produktif meningkatkan kemampuan keluarga untuk memperoleh penghasilan tambahan. - o Keluarga yang mengikuti program mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup anak-anaknya. 3. Peningkatan Kesadaran Sosial dan Kesehatan - o Penyuluhan mengenai kesehatan keluarga, gizi, pendidikan anak, dan perencanaan keluarga meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. - o Keterlibatan keluarga dalam kegiatan sosial dan program pemerintah memperkuat jaringan sosial dan dukungan komunitas.

	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kesadaran Gender - o Sosialisasi dan pelatihan PUG meningkatkan pemahaman aparaturnya pemerintah, masyarakat, dan organisasi terhadap isu gender. - o Kebijakan dan program pembangunan mulai mempertimbangkan dampak gender sehingga lebih inklusif. 2. Pemberdayaan Perempuan - o Pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, dan program ekonomi produktif meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. - o Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga, komunitas, dan organisasi meningkat.
		Program Perlindungan Perempuan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Akses Perlindungan Hukum - o Layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan tersedia di kantor pemerintah, kepolisian, dan lembaga pendamping. - o Penanganan kasus kekerasan dilakukan dengan prosedur yang lebih cepat dan terstruktur, termasuk advokasi hukum bagi korban. 2. Layanan Konseling dan Rehabilitasi - o Perempuan korban kekerasan mendapatkan layanan psikologis, konseling, dan rehabilitasi sosial. - o Program pemulihan sosial-ekonomi membantu perempuan korban untuk kembali mandiri. 3. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat - o Sosialisasi hak-hak perempuan dan cara melapor kekerasan meningkatkan kesadaran masyarakat dan korban. - o Kampanye anti-kekerasan dan edukasi hukum mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan sosial
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Kota Palu berhasil meningkatkan partisipasi keluarga dan program KB melebihi target, namun beberapa aspek kesejahteraan keluarga masih perlu perbaikan. Dengan optimalisasi pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi antar pihak, diharapkan program ini dapat lebih efektif meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak di Kota Palu berhasil membangun sistem data yang terintegrasi dan mendukung penerbitan laporan rutin. Capaian ini menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Meski demikian, pemanfaatan data dalam kebijakan OPD masih perlu ditingkatkan agar program pembangunan lebih responsif terhadap isu gender dan perlindungan anak.
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kota Palu berhasil menjamin hak dasar anak dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, serta meningkatkan partisipasi anak dalam masyarakat. Meski begitu, masih terdapat tantangan akses di wilayah terpencil dan keterbatasan SDM. Dengan peningkatan monitoring, sosialisasi, dan kapasitas pelaksana, program ini diharapkan dapat lebih efektif dan inklusif.
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak di Kota Palu berhasil memberikan layanan perlindungan dan pemulihan kepada anak-anak yang berisiko tinggi. Keberhasilan program terlihat dari pencapaian indikator layanan dan koordinasi antar lembaga. Tantangan utama tetap pada jangkauan anak di wilayah terpencil dan pelaporan kasus yang belum optimal. Dengan peningkatan sosialisasi, kapasitas SDM, dan perluasan layanan, program ini dapat lebih efektif dan inklusif.
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di Kota Palu menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan jumlah atlet, sertifikasi pelatih, dan partisipasi program pembinaan. Tantangan utama terletak pada pencapaian prestasi atlet di tingkat nasional dan keterbatasan fasilitas olahraga. Dengan penguatan pembinaan, renovasi fasilitas, dan dukungan anggaran, program ini dapat lebih efektif meningkatkan daya saing keolahragaan Kota Palu.
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan di Kota Palu berhasil meningkatkan partisipasi anggota, kualitas pembina, dan intensitas kegiatan. Peningkatan keterampilan dan kompetensi peserta menunjukkan keberhasilan program dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan perluasan jangkauan, peningkatan anggaran, dan sosialisasi yang lebih intens, program ini dapat lebih optimal dalam mencetak generasi muda yang disiplin, kreatif, dan berdaya saing.
9	Angka Kemiskinan Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial di Kota Palu berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat rentan, kapasitas ekonomi, dan keterampilan peserta. Tantangan utama terletak pada kemandirian sosial, akses modal, dan pendampingan yang masih perlu diperkuat. Dengan penguatan pelatihan, akses modal, dan pendampingan yang lebih intensif, program ini dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan dan

		Program Rehabilitasi Sosial	kemandirian masyarakat Kota Palu. Program Rehabilitasi Sosial di Kota Palu berhasil meningkatkan jangkauan layanan, keterampilan, dan kemandirian peserta. Tantangan utama terletak pada kebutuhan pendampingan jangka panjang, keterbatasan fasilitas, dan akses ke wilayah terpencil. Dengan penguatan SDM, fasilitas, dan dukungan keluarga, program ini diharapkan dapat lebih efektif memulihkan dan memberdayakan individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
10	Indeks Aktualisasi Pancasila Sekretariat Daerah	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kota Palu berhasil memberikan layanan bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat rentan, dengan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Tantangan utama terletak pada cakupan penuh penerima bantuan, keterbatasan akses wilayah, dan pendampingan kemandirian ekonomi. Dengan perbaikan data, penguatan SDM, dan integrasi program pemberdayaan, program ini diharapkan dapat lebih efektif meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Palu. Program Penanganan Bencana di Kota Palu berhasil meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat melalui pelatihan personel tanggap darurat, sistem peringatan dini, serta sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan. Capaian program terlihat dari meningkatnya respons terhadap bencana dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi risiko. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses ke wilayah terpencil, kebutuhan logistik yang kompleks, dan koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat. Dengan penguatan kapasitas personel, peralatan, dan edukasi masyarakat, program ini diharapkan dapat lebih efektif meminimalkan risiko dan dampak bencana di Kota Palu. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kota Palu berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat. Tantangan utama terdapat pada jangkauan layanan ke wilayah terpencil, keterbatasan SDM, dan prosedur administrasi. Dengan penguatan kapasitas aparatur, penyederhanaan prosedur, dan perluasan jangkauan program, program ini diharapkan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pemerintahan di Kota Palu.

		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan di Kota Palu berhasil meningkatkan kapasitas UMKM, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Tantangan utama berada pada daya saing daerah, percepatan proyek, dan pemerataan pembangunan. Dengan penguatan promosi investasi, akses pasar UMKM, dan penyelesaian proyek infrastruktur, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pembangunan yang merata di Kota Palu.
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kota Palu berhasil meningkatkan keterbukaan informasi, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, dan partisipasi publik melalui sosialisasi dan feedback. Tantangan utama meliputi penyebaran informasi ke seluruh wilayah, keterbatasan SDM, dan adaptasi teknologi. Dengan penguatan SDM, pemanfaatan media digital, dan jangkauan informasi yang lebih luas, program ini diharapkan dapat lebih efektif dalam meningkatkan transparansi, komunikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap Kota Palu.
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika di Kota Palu berhasil meningkatkan digitalisasi layanan publik dan manajemen pemerintahan melalui pengembangan dan pengelolaan 22 aplikasi informatika. Sebagian besar aplikasi berjalan efektif dan digunakan oleh aparatur, mendukung efisiensi administrasi dan integrasi data. Tantangan utama meliputi pemeliharaan aplikasi, kapasitas SDM IT, integrasi sistem, dan keamanan siber. Dengan penguatan kapasitas SDM, integrasi antar-aplikasi, pemeliharaan rutin, dan peningkatan keamanan data, program ini diharapkan lebih efektif dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik di Kota Palu.
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Palu berhasil menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan berguna bagi perencanaan serta pengambilan keputusan. Tantangan utama mencakup metodologi yang seragam, kapasitas SDM, dan integrasi data antar-sektor. Dengan peningkatan koordinasi, standarisasi metodologi, dan penguatan SDM, program ini dapat lebih efektif dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan kebijakan berbasis data di Kota Palu.
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Kota Palu berhasil meningkatkan keamanan dokumen dan data pemerintah melalui pengelolaan sistem persandian, perangkat yang memadai, dan pelatihan aparatur. Sebagian besar dokumen telah diamankan, perangkat persandian berfungsi optimal, dan insiden kebocoran informasi dapat ditangani dengan baik. Tantangan utama meliputi pembaruan sistem persandian, kapasitas SDM, integrasi antar-instansi, dan mitigasi ancaman siber. Dengan penguatan SDM, pemeliharaan rutin, integrasi sistem, dan peningkatan keamanan siber, program ini diharapkan lebih efektif dalam melindungi

			informasi strategis dan mendukung layanan publik digital
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip di Kota Palu berhasil meningkatkan keteraturan, keamanan, dan akses arsip melalui digitalisasi dan pelatihan aparatur. Tantangan utama meliputi digitalisasi arsip lama, penataan fisik arsip, dan kapasitas SDM. Dengan penyelesaian digitalisasi, penataan arsip, dan penguatan SDM, program ini diharapkan lebih efektif dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi pemerintahan di Kota Palu.
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Kota Palu berhasil menjaga keamanan dan kelestarian arsip penting melalui pengamanan, pelatihan aparatur, dan kegiatan penyelamatan. Tantangan utama meliputi fasilitas penyimpanan, perawatan arsip fisik, dan kapasitas SDM. Dengan peningkatan fasilitas, digitalisasi arsip, dan penguatan SDM, program ini diharapkan lebih efektif dalam melindungi arsip strategis dan mendukung akuntabilitas pemerintahan Kota Palu.
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Program Perizinan Penggunaan Arsip di Kota Palu berhasil menyediakan akses arsip yang tertib, aman, dan sesuai prosedur melalui mekanisme perizinan yang jelas. Tantangan utama meliputi verifikasi arsip, kapasitas SDM, dan optimalisasi sistem manajemen arsip. Dengan peningkatan SDM, penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan sistem digital, program ini diharapkan lebih efektif mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di Kota Palu.
		Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan berhasil meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, pengembangan koleksi, serta mendorong minat baca masyarakat. Keberhasilan Program : 1. Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan, Pembinaan perpustakaan daerah, sekolah, dan komunitas meningkatkan kualitas layanan, seperti sistem peminjaman, katalogisasi, dan kenyamanan ruang baca. 2. Peningkatan Minat Baca Masyarakat, Program literasi, lomba membaca, dan kegiatan edukatif mendorong minat baca, terutama pada anak-anak dan pelajar. 3. Pengembangan Koleksi dan Sarana, Penambahan koleksi buku, bahan bacaan, dan media informasi meningkatkan variasi dan kualitas sumber pengetahuan 4. Peningkatan Kapasitas SDM, Pelatihan pustakawan meningkatkan

			kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan, pelayanan pengguna, dan pemanfaatan teknologi informasi.
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Kota Palu menunjukkan keberhasilan dalam upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah melalui kegiatan identifikasi, dokumentasi, konservasi, serta digitalisasi naskah kuno. Keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya jumlah koleksi yang terdata dan terdokumentasi dengan baik, serta terlaksananya kegiatan pelestarian seperti digitalisasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang melampaui target. Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan - o Peningkatan cakupan perekaman dan penerbitan KTP-el serta dokumen kependudukan lainnya menunjukkan kemajuan dalam tertib administrasi penduduk. - o Layanan jemput bola (mobile service) membantu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok rentan. 2. Peningkatan Kualitas Data Kependudukan - o Sistem pendataan yang terintegrasi menghasilkan data yang lebih akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan. - o Validasi dan sinkronisasi data mengurangi duplikasi dan kesalahan data penduduk. 3. Peningkatan Pelayanan Publik - o Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. - o Pelayanan yang lebih cepat dan mudah meningkatkan kepuasan masyarakat. 4. Dukungan terhadap Program Pembangunan - o Data kependudukan yang akurat mendukung penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program pembangunan lainnya secara tepat sasaran. Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil - o Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, dan

			dokumen pencatatan sipil lainnya menunjukkan kemajuan dalam tertib administrasi. - o Layanan jemput bola dan integrasi layanan dengan fasilitas kesehatan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen sejak dini. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan - o Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan sistem digital mempercepat proses penerbitan dokumen pencatatan sipil. - o Pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan meningkatkan kepuasan masyarakat. 3. Ketersediaan Data yang Akurat - o Data pencatatan sipil yang lebih akurat dan mutakhir mendukung perencanaan pembangunan serta pelayanan publik yang tepat sasaran. - o Integrasi data dengan sistem kependudukan memperkuat validitas data nasional dan daerah.
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kualitas dan Integrasi Data - o Data kependudukan menjadi lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi melalui sistem database terpusat. - o Sinkronisasi data antar perangkat daerah meningkatkan konsistensi dan validitas data. 2. Pemanfaatan Data untuk Pelayanan Publik - o Data kependudukan dimanfaatkan untuk berbagai layanan seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemilu secara lebih tepat sasaran. - o Dukungan data yang valid membantu perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy). 3. Pengembangan Sistem Informasi - o Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dan layanan berbasis digital meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data. - o Integrasi dengan layanan online mempermudah instansi dan masyarakat dalam mengakses informasi kependudukan.
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Keberhasilan Program 1. Penyediaan Data Kependudukan yang Komprehensif

			- Profil kependudukan berhasil disusun secara berkala dan mencakup berbagai indikator penting, seperti jumlah penduduk, distribusi wilayah, usia, dan kondisi sosial ekonomi. - Data yang tersedia mendukung analisis pembangunan dan perencanaan program secara lebih tepat sasaran. 2. Peningkatan Kualitas Data - Data yang disajikan semakin akurat dan mutakhir melalui pemanfaatan sistem administrasi kependudukan dan integrasi data lintas sektor. - Validasi dan pembaruan data secara berkala mengurangi kesalahan dan duplikasi data. 3. Pemanfaatan Data dalam Perencanaan - Profil kependudukan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Keberhasilan Program 1. Penyediaan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data - Kegiatan penelitian dan kajian menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. - Hasil kajian menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan. 2. Pengembangan Inovasi Daerah - Munculnya inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. - Penerapan inovasi mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
	Badan Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

			- Ekstensifikasi objek pajak dan retribusi memperluas basis penerimaan daerah. - Peningkatan Sistem dan Digitalisasi - Penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis elektronik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pembayaran. - Integrasi data perpajakan membantu meminimalkan kebocoran pendapatan. - Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak - Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi.
	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manuasia Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Keberhasilan Program - Peningkatan Kualitas SDM ASN - Pelaksanaan pelatihan, diklat, dan pengembangan kompetensi meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan sosial ASN. - ASN menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. - Penerapan Sistem Merit - Pengelolaan kepegawaian mulai berbasis kinerja dan kompetensi, termasuk dalam promosi, mutasi, dan penilaian ASN. - Transparansi dalam proses kepegawaian meningkat dan mengurangi praktik non-profesional. - Peningkatan Disiplin dan Kinerja ASN - Sistem penilaian kinerja dan pengawasan disiplin mendorong ASN bekerja lebih produktif dan bertanggung jawab. - Penerapan e-kinerja membantu monitoring capaian kinerja pegawai secara lebih terukur.
	RSU. Anutapura	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Keberhasilan Program - Peningkatan Akses Layanan Kesehatan - Masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan melalui puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. - Cakupan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan ibu dan

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	anak, imunisasi, dan layanan penyakit umum, mengalami peningkatan. 2. Peningkatan Upaya Preventif dan Promotif - o Program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS) meningkatkan kesadaran masyarakat. - o Deteksi dini penyakit dan pencegahan stunting semakin diperkuat melalui kegiatan berbasis masyarakat. 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan - o Tenaga kesehatan yang semakin terlatih serta ketersediaan sarana pelayanan meningkatkan mutu layanan kesehatan. - o Standar pelayanan kesehatan mulai diterapkan secara lebih konsisten di fasilitas kesehatan. Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan - o Pelaksanaan pelatihan teknis, workshop, dan pendidikan berkelanjutan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam pelayanan medis dan kesehatan masyarakat. - o Sertifikasi profesi mendukung standar pelayanan yang lebih baik dan terukur. 2. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja - o Penguatan sistem penilaian kinerja dan pembinaan karier mendorong tenaga kesehatan bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. - o Tenaga kesehatan lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		Keberhasilan Program 1. Kelancaran Fungsi Legislasi - o Dukungan administrasi dan teknis memungkinkan DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda) secara lebih efektif dan tepat waktu. - o Penyediaan tenaga ahli membantu meningkatkan kualitas substansi peraturan yang dihasilkan. 2. Optimalisasi Fungsi Penganggaran - o Fasilitasi pembahasan APBD dan dokumen anggaran lainnya berjalan lancar, sehingga mendukung penyusunan anggaran yang lebih akuntabel dan tepat sasaran. 3. Penguatan Fungsi Pengawasan - o Dukungan kegiatan rapat kerja, kunjungan lapangan, dan evaluasi

			program membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan
	Kecamatan Palu Selatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayan Publik Dan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - o Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan kepada masyarakat. - o Implementasi pelayanan terpadu (one-stop service) meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat. 2. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - o Penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. - o Implementasi sistem kinerja dan pelaporan (SAKIP) meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat - o Masyarakat semakin aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui musyawarah desa/kelurahan. - o Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan meningkatkan rasa memiliki (ownership) terhadap hasil pembangunan. 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - o Program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha produktif membantu masyarakat meningkatkan pendapatan. - o Pengembangan UMKM dan kelompok usaha bersama memperkuat ekonomi lokal.
	Kecamatan Mantikulore	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayan Publik Dan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - o Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan kepada masyarakat. - o Pengembangan pelayanan terpadu (one-stop service) mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan. 2. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - o Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat. - o Penerapan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) membantu pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat - o Masyarakat semakin aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah desa/kelurahan. - o Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan meningkat, menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif. 2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal - o Program pelatihan dan bantuan usaha produktif mampu meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat. - o Pengembangan UMKM dan kelompok usaha bersama memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Stabilitas Daerah - o Terjaganya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. - o Potensi konflik sosial dapat diminimalisir melalui deteksi dini dan penanganan yang cepat. 2. Penguatan Wawasan Kebangsaan - o Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan toleransi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI.
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan - o Sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berjalan lebih terstruktur dan akuntabel. - o Implementasi SAKIP mendorong peningkatan kualitas perencanaan

				dan evaluasi kinerja. 2. Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Lebih Baik ○ Pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan efisien melalui sistem yang terintegrasi. ○ Penataan dan pemanfaatan aset daerah mendukung kelancaran operasional
	Kecamatan Palu Barat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik Dan		Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ○ Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan kepada masyarakat. ○ Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan. 2. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ○ Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi semakin meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan. ○ Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendukung pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Keberhasilan Program 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat ○ Masyarakat semakin aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui musyawarah desa/kelurahan. ○ Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ○ Pelatihan keterampilan dan bantuan usaha produktif membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. ○ Pengembangan UMKM dan kelompok usaha bersama memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas. 3. Penguatan Kelembagaan Lokal ○ Lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, PKK, dan karang taruna semakin aktif dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.
	Kecamatan Palu Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan		Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ○ Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan meningkatkan

		Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan kepada masyarakat. - o Implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. 2. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - o Penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat. - o Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Keberhasilan Program 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat - o Masyarakat semakin aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui musyawarah desa/kelurahan. - o Tumbuhnya rasa memiliki (ownership) terhadap hasil pembangunan sehingga meningkatkan keberlanjutan program. 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - o Pelatihan keterampilan dan dukungan usaha produktif membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. - o Pengembangan UMKM dan kelompok usaha bersama memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.
	Kecamatan Tatanga	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Keberhasilan Program : 1. Peningkatan Kepuasan Masyarakat, Kualitas pelayanan yang semakin baik berdampak pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah. Keberhasilan Program 1. Penguatan Kelembagaan Lokal, Lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, PKK, dan karang taruna semakin aktif dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.
	Kecamatan Tawaeli	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Keberhasilan Program : Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Pengembangan layanan berbasis digital (e-government) meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas pelayanan publik. Integrasi sistem informasi mendukung pengelolaan data dan pelayanan yang lebih

	Kecamatan Tawaeli	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Dan	efektif. Keberhasilan Program : Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Pengembangan layanan berbasis digital (e-government) meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas pelayanan publik. Integrasi sistem informasi mendukung pengelolaan data dan pelayanan yang lebih efektif.
	Kecamatan Tawaeli	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Dan	Keberhasilan Program : Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Pengembangan layanan berbasis digital (e-government) meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas pelayanan publik. 4. Integrasi sistem informasi mendukung pengelolaan data dan pelayanan yang lebih efektif.
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Keberhasilan Program : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 1. Pelatihan keterampilan dan dukungan usaha produktif membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Pengembangan UMKM dan kelompok usaha bersama memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.

	Kecamatan Ulujadi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik Dan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - o Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan kepada masyarakat. - o Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan. 2. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - o Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi semakin meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan. - o Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendukung pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
	Kecamatan Palu Utara	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik Dan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat - o Masyarakat semakin aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui musyawarah desa/kelurahan. - o Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - o Pelatihan keterampilan dan bantuan usaha produktif membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan UMKM dan kelompok usaha bersama memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas. Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - o Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan kepada masyarakat. - o Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan. 2. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - o Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi semakin meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan. - o Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendukung pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi - o Pengembangan layanan berbasis digital (e-government) meningkatkan

12	Opini BPK Inspektorat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	efisiensi dan mempercepat proses pelayanan. ○ Sistem informasi mendukung integrasi data dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Keberhasilan Program 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat ○ Masyarakat semakin aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui musyawarah desa/kelurahan. ○ Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. 2. Peningkatan Kapasitas SDM ○ Pelatihan dan pendampingan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang kewirausahaan, sosial, dan pengelolaan kegiatan komunitas.
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kualitas Kebijakan ○ Kebijakan yang dihasilkan lebih sistematis, berbasis data, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan. ○ Proses perumusan kebijakan melibatkan analisis yang lebih komprehensif dan partisipatif. 2. Pendampingan Perangkat Daerah ○ Asistensi teknis dan manajerial membantu perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran. ○ Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Keberhasilan Program 1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi ○ Pelaksanaan audit dan revidu mendorong perangkat daerah untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan. ○ Temuan pengawasan menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran Tahun 2024 dengan rincian realisasi capaian target kinerja Tahun 2025 pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Perbandingan Target dan realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	5	4,36	87,20	Rp 103.504.612.512,14	Rp83.373.726.510,00	80,55 %
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	100	132,58	132,58	Rp 103.045.580.293,62	Rp93.532.180.171,00	90,77 %
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	75,28	81,59	108,38	Rp 59.752.858.280,96	Rp55.057.294.105,00	92,14 %
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kewaspadaan Nasional	63	77,14	122,44	Rp 32.198.411.188,56	Rp23.491.777.376,00	72,96 %
4	Meningkatnya struktur yang berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan	8,38	9,23	110,14	Rp 104.432.086.144,64	Rp99.691.214.217,00	95,46 %

		Persentase luas Kawasan kumuh	0,03	0,21	-500	Rp 54.056.345.985,00	Rp47.068.288.578,00	87,07 %
		Persentase rumah tidak layak huni	1,1	1,43	70	Rp 8.581.201.820,00	Rp 7.374.624.101,00	85,94 %
5	Meningkatnya kualitas SDM	Indekspembangunan manusia	84,37	84,53	100,19	Rp 651.733.970.847,57	Rp458.351.911.797,00	70,32 %
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	4,75	5,26	89,26	Rp 25.329.780.006,90	Rp 22.301.054.069,25	88,04 %
7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	84	78,81	93,82	Rp 8.620.004.578,22	Rp 7.575.317.655,00	87,88 %
8	Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	80	74,16*	92,70	Rp 610.199.927.918,56	Rp417.627.397.116,60	68,44 %
		Opini BPK	WTP	WTP	100	Rp 37.718.440.042,69	Rp 32.805.488.521,00	86,97 %

Sumber : Bappeda dan BPKAD Kota Palu Tahun 2025, diolah

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat dengan membandingkan ketercapaian target anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran Tabel di atas menunjukkan realisasi sebesar 74,93 % yang artinya anggaran yang ada belum digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran. Efisiensi anggaran tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Palu dalam penggunaan anggaran yang efektif dan berfokus pada *outcome* dan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci dibawah :

Tabel 3.16

Efisiensi Anggaran Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,32	4,36	100,93	Rp 103.504.612.512,14	Rp 83.373.726.510,00	19,45 %
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	100	132,58	74,94	Rp 103.045.580.293,62	Rp 93.532.180.171,00	9,23 %
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	75,28	81,59	108,38	Rp 59.752.858.280,96	Rp 55.057.294.105,00	7,86 %
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	63	77,14	122,44	Rp 32.198.411.188,56	Rp 23.491.777.376,00	27,04 %
4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan	8,28	9,23	111,47	Rp 104.432.086.144,64	Rp 99.691.214.217,00	4,54 %
		Persentase luas Kawasan kumuh	0,03	0,21	-500	Rp 54.056.345.985,00	Rp 47.068.288.578,00	12,93 %
		Persentase rumah tidak layak huni	9,21	1,43	184,47	Rp 8.581.201.820,00	Rp 7.374.624.101,00	14,06 %

5.	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	82,40	84,53	102,58	Rp 651.733.970.847,57	Rp 458.351.911.797,00	29,68 %
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	4,50	5,26	83,11	Rp 25.329.780.006,90	Rp 22.301.054.069,25	11,96 %
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan dan kearifan lokal dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	71	78,81	111	Rp 8.620.004.578,22	Rp 7.575.317.655,00	12,12 %
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	90	74,16*	82,40	Rp 610.199.927.918,56	Rp 417.627.397.116,60	31,56 %
		Opini BPK	WTP	WTP	100	Rp 37.718.440.042,69	Rp 32.805.488.521,00	13,03 %

Selanjutnya, program yang mendukung pencapaian indikator sasaran Tahun 2025 diuraikan dalam Tabel 3.17 di bawah ini :

Tabel 3.17

Program dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	IKU DAN PROGRAM	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Rp 103.504.612.512,14	Rp 83.373.726.510,00
	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.456.574.150,00	Rp 1.404.612.038,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.587.299.397,00	Rp 4.692.904.247,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 718.556.750,00	Rp 286.412.646,00
		Program Pemasaran Pariwisata	Rp 3.986.736.400,00	Rp 2.258.013.940,00
	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp 83.263.000,00	Rp 82.224.800,00
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 152.892.600,00	Rp 147.872.150,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp 643.976.600,00	Rp 392.572.732,00
		Program Pengembangan Umkm	Rp 12.453.016.759,00	Rp 10.005.727.904,00

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.278.849.894,00	Rp 5.283.223.891,00
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 367.977.400,00	Rp 251.583.652,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 59.745.400,00	Rp 59.595.100,00
	Program Hubungan Industrial	Rp 190.159.800,00	Rp 188.309.800,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 17.550.000,00	Rp 14.080.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.448.792.081,15	Rp 7.274.042.292,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 7.542.836.700,00	Rp 7.469.138.636,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 1.314.690.000,00	Rp 1.272.182.000,00
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp 171.695.500,00	Rp 169.995.712,00
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp 7.011.342.416,56	Rp 6.076.411.878,00
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 55.200.000,00	Rp 50.200.000,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 40.325.000,00	Rp 35.395.000,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 61.643.200,00	Rp 59.675.000,00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 55.755.150,00	Rp 55.643.550,00
Kawasan Ekonomi Khusus	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 90.326.000,00	Rp 89.387.788,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 143.430.000,00	Rp 143.130.000,00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 3.109.900.000,00	Rp 1.452.979.032,00
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 450.000,00	Rp -
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.911.566.378,32	Rp 3.255.872.674,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 466.966.650,00	Rp 458.330.892,00
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 80.481.500,00	Rp 79.650.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.230.961.199,46	Rp 5.516.790.912,00

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.692.911.012,00	Rp 428.824.425,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.494.941.819,00	Rp 2.256.150.413,00
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 812.948.973,86	Rp 777.868.950,00
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 3.506.876.220,00	Rp 2.572.470.238,00
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 397.018.850,00	Rp 364.614.400,00
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 21.488.600,00	Rp 16.565.100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.722.865.746,79	Rp 16.737.932.055,00
	Rogram Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 93.184.975,00	Rp 87.785.775,00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 32.836.700,00	Rp 24.884.700,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 595.384.390,00	Rp 558.194.902,00
	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 905.104.600,00	Rp 623.284.380,00

		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 496.090.700,00	Rp 399.192.906,00
2	Indeks Risiko Bencana		Rp 103.045.580.293,62	Rp 93.532.180.171,00
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 608.926.300,00	Rp 573.191.119,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.587.947.906,67	Rp 6.431.295.690,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 856.454.000,00	Rp 837.190.941,00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 47.238.000,00	Rp 41.687.800,00
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 10.050.250,00	Rp 5.550.100,00
		Program Penatagunaan Tanah	Rp 644.351.700,00	Rp 502.751.159,00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 828.188.800,00	Rp 819.516.407,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.522.430.405,85	Rp 11.362.674.673,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Rp 2.030.213.025,00	Rp 1.669.706.292,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.216.857.358,10	Rp 5.325.479.875,00
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 70.692.922.548,00	Rp 65.963.136.115,00
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Rp 59.752.858.280,96	Rp 55.057.294.105,00
	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 193.347.600,00	Rp 185.324.600,00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 817.202.722,00	Rp 734.928.526,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 12.803.183.579,00	Rp 11.860.468.915,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp 345.323.150,00	Rp 318.591.150,00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 2.269.989.300,00	Rp 2.222.149.830,00
		Program Pengelolaan Persampahan	Rp 27.107.132.030,00	Rp 26.124.447.985,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.216.679.899,96	Rp 13.611.383.099,00
4	Indeks Kewaspadaan Nasional		Rp 32.198.411.188,56	Rp 23.491.777.376,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 3.451.690.000,00	Rp 3.236.740.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.869.400.926,56	Rp 15.753.354.808,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.476.269.212,00	Rp 1.383.323.122,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 59.022.900,00	Rp 46.751.200,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 2.690.570.850,00	Rp 2.443.775.146,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 651.457.300,00	Rp 627.833.100,00
5	Persentase Jalan yang Berkeselamatan		Rp 104.432.086.144,64	Rp 99.691.214.217,00
	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan	Rp 42.344.077.548,99	Rp 42.038.839.192,00

		Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.961.488.388,65	Rp 12.800.333.685,00
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 45.997.705.207,00	Rp 44.756.253.840,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 128.815.000,00	Rp 95.787.500,00
6	Persentase Rumah tidak layak huni		Rp 8.581.201.820,00	Rp 7.374.624.101,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	Rp 566.233.700,00	Rp 507.865.900,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.014.968.120,00	Rp 6.866.758.201,00
7	Persentase Luas Kawasan Kumuh		Rp 54.056.345.985,00	Rp 47.068.288.578,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Kawasan Permukiman	Rp 12.018.386.000,00	Rp 9.555.294.352,00
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 10.617.670.400,00	Rp 6.916.597.835,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp 16.155.144.483,00	Rp 15.742.820.607,00
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp 2.482.592.680,00	Rp 2.470.289.308,00

		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.114.469.000,00	Rp 7.980.350.236,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 413.331.100,00	Rp 372.195.050,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 4.254.752.322,00	Rp 4.030.741.190,00
8	Indeks Pembangunan Manusia		Rp 651.773.970.847,57	Rp 458.351.911.797,00
	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 114.541.975.004,19	Rp 50.483.472.455,00
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 113.235.000,00	Rp 113.185.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 338.060.929.224,05	Rp 224.447.342.640,00
		Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 3.595.318.850,00	Rp 3.507.075.000,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 111.175.000,00	Rp 111.175.000,00
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 77.217.235.490,00	Rp 71.742.150.529,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 923.323.000,00	Rp 803.012.530,00

	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 263.903.900,00	Rp 254.896.376,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 245.102.900,00	Rp 244.127.300,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 82.142.354.370,82	Rp 77.313.556.517,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Rp 259.307.450,00	Rp 185.964.800,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.923.838.897,62	Rp 5.583.638.550,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp 3.493.467.408,00	Rp 2.867.937.326,00
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp 2.345.459.400,00	Rp 2.057.048.400,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 27.111.700,00	Rp 26.761.700,00
	Program Perlindungan Perempuan	Rp 449.362.650,00	Rp 326.329.150,00
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 1.167.705.400,00	Rp 1.111.715.440,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.326.611.363,52	Rp 4.276.005.303,00
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 31.750.500,00	Rp 31.750.500,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp 128.613.000,00	Rp 117.911.178,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 85.561.900,00	Rp 85.098.700,00
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 8.442.683.400,00	Rp 7.466.409.366,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 496.022.600,00	Rp 483.858.600,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.381.922.439,37	Rp 4.711.489.437,00
9	Angka Kemiskinan		Rp 25.329.780.006,90	Rp 22.301.054.069,25
	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 241.176.100,00	Rp 143.780.950,00
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 11.464.000,00	Rp 11.460.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	Rp 965.617.875,00	Rp 844.460.500,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 14.595.458.535,00	Rp 12.911.420.646,00
		Program Penanganan Bencana	Rp 1.377.506.360,00	Rp 1.369.314.900,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.138.557.136,90	Rp 7.020.617.073,25
10	Indeks Aktualisasi Pancasila		Rp 8.620.004.578,22	Rp 7.575.317.655,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 3.516.327.350,00	Rp 3.332.486.048,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.103.677.228,22	Rp 4.242.831.607,00
11	Indeks Reformasi		Rp 610.199.927.918,56	Rp 417.627.397.116,60
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 23.226.641.800,00	Rp 19.087.239.368,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 3.235.734.950,00	Rp 3.137.154.731,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 52.400.441.599,24	Rp 44.797.531.727,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 1.328.424.100,00	Rp 1.238.608.331,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 3.855.045.930,00	Rp 3.561.932.438,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.717.458.931,14	Rp 5.153.345.943,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 418.239.750,00	Rp 396.390.508,00

	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 235.893.500,00	Rp 214.806.437,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Program Pengelolaan Arsip	Rp 89.553.150,00	Rp 84.829.721,00
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp 27.339.000,00	Rp 27.280.000,00
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp 2.460.000,00	Rp 2.460.000,00
	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 945.245.200,00	Rp 898.172.550,00
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp 54.755.800,00	Rp 49.427.420,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.388.041.429,90	Rp 5.438.688.979,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 328.044.000,00	Rp 327.685.000,00
	Program Pencatatan Sipil	Rp 107.119.150,00	Rp 106.010.700,00
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 58.347.400,00	Rp 58.196.600,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 22.800.000,00	Rp 22.800.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.785.582.589,83	Rp 7.636.851.294,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 934.270.000,00	Rp 481.067.856,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.481.449.952,86	Rp 3.528.140.656,00
	Badan Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 8.899.586.350,00	Rp 8.294.924.306,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28.438.275.710,97	Rp 20.961.973.019,00
	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manuasia Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Rp 1.842.473.702,00	Rp 1.770.322.410,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.807.901.738,58	Rp 7.600.630.337,00
	RSU. Anutapura	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 19.891.323.320,00	Rp 18.458.954.626,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 43.459.200,00	Rp 40.066.140,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 200.820.403.695,56	Rp 56.337.551.053,00
	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp 21.688.368.100,00	Rp 19.435.809.248,00

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.964.495.366,57	Rp 30.605.911.151,00
Kecamatan Palu Selatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 8.160.000,00	Rp 8.110.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 11.195.455.933,00	Rp 10.322.534.449,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 241.950.000,00	Rp 241.950.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.029.059.996,88	Rp 10.204.160.130,00
Kecamatan Mantikulore	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 55.680.000,00	Rp 55.680.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 13.982.213.270,97	Rp 13.384.619.040,60
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 387.115.450,00	Rp 387.072.910,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.821.089.061,90	Rp 13.858.688.337,00
Kecamatan Palu Barat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 13.395.000,00	Rp 13.395.000,00
	Program Pemberdayaan	Rp 8.833.270.155,73	Rp 8.208.938.011,00

		Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 352.234.800,00	Rp 331.280.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.134.222.290,43	Rp 10.135.950.289,00
	Kecamatan Palu Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 7.532.500,00	Rp 6.797.500,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 8.314.422.406,97	Rp 8.124.923.983,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 381.135.100,00	Rp 379.440.100,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.113.268.267,52	Rp 9.563.958.561,00
	Kecamatan Tatanga	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 16.015.000,00	Rp 15.815.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 9.574.332.400,00	Rp 8.849.011.021,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 338.500.000,00	Rp 321.250.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.253.297.009,91	Rp 9.931.226.725,00

	Kecamatan Tawaeli	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 13.111.600,00	Rp 12.974.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 9.689.166.971,00	Rp 8.342.038.733,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 342.796.000,00	Rp 292.288.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.432.646.832,43	Rp 7.660.852.506,00
	Kecamatan Ulujadi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 32.869.700,00	Rp 32.869.700,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 11.315.885.048,00	Rp 10.427.453.232,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 804.938.850,00	Rp 780.268.650,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.604.810.591,63	Rp 8.996.523.254,00
	Kecamatan Palu Utara	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 7.085.600,00	Rp 7.085.600,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 9.168.913.300,00	Rp 8.489.546.216,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 309.734.800,00	Rp 305.984.800,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.386.444.566,40	Rp 8.179.948.820,00
12	Opini BPK		Rp 37.718.440.042,69	Rp 32.805.488.521,00
	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 191.332.000,00	Rp 170.922.040,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.090.587.100,00	Rp 845.778.195,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.210.939.562,87	Rp 12.262.262.314,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 7.809.398.466,25	Rp 5.526.057.510,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.268.573.600,00	Rp 2.134.004.260,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.147.609.313,57	Rp 11.866.464.202,00

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan program/kegiatan menunjukkan sejauh mana input yang digunakan mampu menghasilkan *output* maupun *outcome* secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi, efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun berjalan dapat dihasilkan melalui beberapa hal seperti :

1. Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan lebih rendah dibandingkan pagu yang ditetapkan, namun tetap mampu mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang efektif melalui pengendalian belanja, prioritas kegiatan, *Crosscutting* serta optimalisasi penggunaan anggaran berbasis kinerja.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemanfaatan SDM dilakukan secara optimal melalui pembagian tugas yang proporsional, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan sistem kerja yang lebih efektif guna menghasilkan *output* maupun *outcome*. Penggunaan tenaga kerja yang tepat sasaran mampu meningkatkan produktivitas tanpa perlu penambahan personel secara signifikan serta adanya ruang perbaikan dalam pemanfaatan kompetensi.

3. Efisiensi Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Hal ini didukung oleh perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar unit kerja, OPD maupun pihak lain guna mencapai tujuan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung percepatan proses administrasi dan pelaporan yang dibutuhkan.

4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Penggunaan fasilitas dan aset daerah dilakukan secara optimal melalui pemeliharaan rutin dan pemanfaatan bersama (*sharing resources*) antar perangkat daerah sehingga tidak ada lagi penyewaan gedung maupun peralatan. Digitalisasi layanan juga turut menekan kebutuhan penggunaan sarana fisik secara berlebihan tanpa mengurangi optimalisasi pekerjaan.

5. Faktor Pendukung

Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pendukung yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan efisiensi seperti menerapkan prinsip *money follow* program penggunaan sistem berbasis elektronik, peningkatan kapasitas aparatur maupun pengawasan internal sehingga mengurangi penggunaan jasa konsultan karena kapasitas pegawai sudah cukup mumpuni.

B. Realisasi Anggaran

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021- 2026 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi;
2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi belanja dengan pendekatan *money follow* program berbasis *outcome*;
4. Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; serta
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yakni sebesar Rp. 1.853.451.710.342,71 dengan rincian sebagai Berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan APBD Kota Palu Tahun 2025 pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada adanya peningkatan pendapatan melalui intensifikasi yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2025 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.853.451.710.342,71. Adapun laporan realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.18

Capaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN 1	TARGET (Rp) 2	REALISASI (Rp) 3	% 4
PAD	637.534.655.689,56	555.418.926.849,10	87,12
Pendapatan Transfer	1.210.672.729.653,15	1.194.676.827.627,27	98,67
Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.244.325.000,00	1.225.284.386,00	23,36
Total	1.853.451.710.342,71	1.751.321.038.862,37	94,48

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2025

Tabel 3.18 menguraikan capaian PAD belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 yakni sebesar Rp. 637.534.655.689,56 Realisasi PAD sebesar Rp 555.418.926.849,10 atau sebesar 87,12%. Realisasi pendapatan transfer tahun 2025 sebesar Rp. 1.194.676.827.627,27 atau mencapai 98,68% dari target yang direncanakan. Untuk realisasi lain-lain pendapatan yang sah hanya terealisasi sebesar Rp. 1.225.284.386,00 atau terealisasi 23,36 %.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan pendekatan program dan kegiatan berbasis *outcome*. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Kebijakan Belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam Tabel 3.19 :

Tabel 3.19
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN REALISASI		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	1	2	3	4
1	Belanja Operasi	1.590.764.997.230,99	1.452.729.572.045,46	91,32
2	Belanja Modal	270.076.470.379,02	248.228.081.453,60	91,91
3	Belanja Tak terduga	2.100.629.816,25	31.187.500,00	1,5
4	Belanja Transfer	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
	Total Belanja	1.863.842.097.426,26	1.701.888.840.999,06	92,39

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas, diuraikan bahwa belanja Tahun 2025 sebesar Rp. 1.863.842.097.426,26 yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.590.764.997.230,99,-, belanja modal sebesar Rp. 270.076.470.379,02,-, belanja tak terduga sebesar Rp. 2.100.629.816,25,-, dan belanja transfer sebesar Rp. 2.100.629.816,25. Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp. 1.701.888.840.999,06,- atau 92,39% yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.452.729.572.045,46, belanja modal sebesar Rp. 248.228.081.453,60,-, belanja tak terduga sebesar Rp. 31.187.500,00,- dan Belanja transfer sebesar Rp. 900.000.000.

3. Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2025 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.20 Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	1	2	3	4
1	Penerimaan Daerah	10.390.387.083,55	11.673.278.256,55	112%
2	Pengeluaran Daerah	0	0	0%
3	Pembiayaan Netto	10.390.387.083,55	11.673.278.256,55	112%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.20 di atas, penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 yang ditargetkan sebesar Rp10.390.387.083,55 terealisasi sebesar Rp. 11.673.278.256,55 atau 112% dan pengeluaran pembiayaan daerah yang ada di anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp. 0,-, atau tidak dianggarkan

3.2 INOVASI PEMERINTAH KOTA PALU

Berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah Realisasi IKU “Indeks Inovasi Daerah” diperoleh dari hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025. Keputusan Menteri tersebut menetapkan skor Indeks Inovasi Kota Palu sebesar 58,32 dengan predikat “Inovatif”. Realisasi tersebut lebih rendah dari target kinerja tahun 2025 yaitu pada skor 70, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 83,31% dengan predikat “Inovatif”.

Realisasi IKU “Indeks Kinerja Riset dan Inovasi Daerah” berada diangka 56,83 lebih rendah dari target kinerja yang ditetapkan di tahun 2025 sebesar nilai indeks 59,1 dengan capaian yang diperoleh sebesar 96,16% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian sasaran strategis diatas diperoleh berdasarkan representasi dari jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah lingkup Kota Palu selama kurun waktu dua tahun terakhir yang menjadi tolak ukur penilaian indeks inovasi tata Kelola pemerintahan maupun pelayanan publik yang jumlah usulan inovasi daerah sebanyak 16 usulan, 13 usulan diantaranya ditetapkan menjadi kebijakan inovasi daerah dengan status penerapan dan menjadi tolak ukur pengukuran indeks Kota Palu meliputi :

Tabel 3.21 Rekapitulasi Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah yang Dilaporkan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Inisiator	Urusan Pemerintahan Utama
1.	Inovasi Manajemen Kurikulum Merdeka Berbasis Lingkungan dan Budaya Lokal Intstfor Cabe BB3 dalam Revolusi Industri 4,0 & 5,0 SD Inpres 3 Birobuli Kota Palu	Pelayanan Publik	Arham, S.Pd., M.Pd.	Pendidikan
2.	Sistem Percepatan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Chatbot (SIRATUBOT)	Pelayanan Publik	Fajarini, S.STP., M.Si.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

				Sipil
3.	Perisai Srikandi Pakagali	Pelayanan Publik	Herdy Firmansyah, S.K.M.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
4.	Inovasi Berdasi (Berburu Data Investasi)	Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Penanaman Modal
5.	NABELO (Inovasi Program Layanan Kesehatan pada Sistem Pendaftaran Pasien Secara Online)	Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan Kota Palu	Kesehatan
6.	Forum Disabilitas Madamba Rara	Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Perencanaan
7.	PELAYAN SEKSI (Pelayanan khusus Disabilitas, Orang Sakit, ODGJ, dan Lansia)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Gade Nolumako (Pasar Murah Berjalan)	Pelayanan Publik	Andriani, S.T.	Perdagangan
9.	Layanan INKLING Mantap Bergerak (Pelayanan Perizinan Keliling Mantap Bergerak)	Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palu	Penanaman Modal
10.	Layanan Pharmacy Express Bebas Antri Obat di RSUD Anutapura Palu	Pelayanan Publik	apt. Herni Syam, S.Farm.	Kesehatan
11.	Sistem Informasi Pajak berbasis Elektronik Kota Palu	Pelayanan Publik	Eka Komala Sari, S.E., M.M.	Keuangan
12.	Layanan Unggulan Kanker Terpadu melalui "Anutapura Cancer Care"	Pelayanan Publik	dr. Masita Muchtar	Kesehatan

13.	Siap Rehabilitasi Napza dan Empati (SIRENE)	Pelayanan Publik	Auliandri Amas, S.Psi.	Sosial
14.	CERIA (Cegah Pernikahan Anak)	Pelayanan Publik	Yudhi Riyani Firman, S.Sos., M.Si.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
15.	Aplikasi Pakagali	Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Lingkungan Hidup
16.	TAS GRATIS (Utilitas Integrasi Data Diri Sendiri)	Pelayanan Publik	Walawati, S.E.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	LAYANGAN PUTUS (Layanan Pengadilan Agama dan Disdukcapil dalam Menerbitkan Dokumen Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.	E-Hadirku	Tatakelola Pemerintahan	H. Hadianto Rasyid, S.E.	Kepegawaian
19.	Bus Rapid Transit (BRT) dengan Skema Buy The Service	Pelayanan Publik	Dinas Perhubungan Kota Palu	Perhubungan
20.	SIPKU (Sistem Informasi Permukiman Kumuh)	Tatakelola Pemerintahan	Irvan, S.T., M.Si.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21.	Klinik Inovasi Bergerak	Tatakelola Pemerintahan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu	Penelitian dan Pengembangan
22.	Kamis Palu Ber-KB	Pelayanan Publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23.	Warung Konsultasi Pengawasan (WARKOP)	Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kota Palu	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.22

**Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung
1	Menyampaikan dokumen perencanaan kinerja terbaru di level Perangkat Daerah yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan memastikan kualitas rumusan tujuan, sasaran dan indikator pada dokumen perencanaan terbaru (2025-2029) telah berorientasi outcome, SMART dan selaras dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029;	Opd Kota Palu telah mengupload Renstra Tahun 2025-2029 di laman ESR MENPAN.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah dilaksanakan	20 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1e75NQqeR0X97XImrwCO7Ws6cFBcHulDR?usp=sharing

2	Menyusun pohon kinerja sesuai dengan perencanaan terbaru dan memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis dan menggambarkan hubungan sebab akibat serta mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang cukup untuk mencapai kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;	Telah disesuaikan pohon kinerja sesuai dengan perencanaan terbaru dan memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis dan menggambarkan hubungan sebab akibat serta mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang cukup untuk mencapai kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah dilaksanakan	20 Februari 2026	https://drive.google.com/file/d/1BF55cwKJxxbP_VTQze2WiKYKAK_TH0Q/view?usp=sharing
---	--	---	--------------------------------------	--------------------	------------------	---

3	Melakukan identifikasi atau pemetaan adanya potensi crosscutting kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.	telah melakukan identifikasi terkait <i>cross cutting</i> guna menunjang capaian dan kinerja OPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah dilaksanakan dan terus berproses	3 januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1ULggZhc6pVa4Nf6ebd3yADC8Qko1rUpi?usp=sharing
4	Memastikan kembali definisi operasional/ formulasi perhitungan pada masing-masing indikator kinerja Perangkat Daerah disertai dengan referensi yang relevan sehingga benar-benar menggambarkan data capaian kinerja yang andal dan menggambarkan indikator kinerja yang ada;	Telah Memastikan definisi operasional/ formulasi perhitungan pada masing-masing indikator kinerja Perangkat Daerah disertai dengan referensi yang relevan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah dilaksanakan dan terus berproses	3 januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1NQaEEBB5J7IQcl2mBVj1LpviWmY7ViNs?usp=sharing
5	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi https://esakip.palukota.go.id/ untuk mengumpulkan dan memonev data kinerja Perangkat Daerah secara berkala sehingga capaian	aplikasi https://esakip.palukota.go.id/ untuk pengumpulan dan monev data kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Telah dilaksanakan dan terus berproses	3 januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1XtPArQbQcsSJ_rAoN05np14ay4zEHVuu?usp=sharing

	kinerja dapat terpantau dan terjaga.	sedang dalam pemeliharaan				
6	Melengkapi laporan kinerja pada sebagian Perangkat Daerah dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja, tidak hanya melaporkan sebatas realisasi anggaran saja;	Laporan efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi internal sehingga target kinerja dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas output.	Organisasi Perangkat Daerah	Telah dilaporkan pada BAB III LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	23 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1UZvD-YPvjxt_XssxeA7GIWupbuzY4PEz?usp=sharing

7	Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja ke depan, khususnya kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya.	OPD kota Palu telah melakukan pemetaan terkait menentukan target, strategi serta langkah-langkah yang dianggap perlu dilakukan kedepannya dengan sumber dari laporan kinerja perangkat daerah	Organisasi Perangkat Daerah	Telah dilaksanakan	24 Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1VdmgxBWEtwO_wz7lxVts3sacuTQIMmQn?usp=sharing
8	Meningkatkan kualitas monev tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dan mendorong perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil evaluasi internal untuk perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP perangkat daerah;	membuat SK terkait pembagian wilayah tugas pembinaan pejabat fungsional inspektorat daerah kota palu	Inspektorat	Telah diproses	24 februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1deF3zubs796XaKaQ9C-K9I9n9D9ui4uw?usp=sharing

9	Mengimplementasikan kebijakan reward and punishment berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerjanya.	inspektorat daerah telah melakukan pemeriksaan terkait implementasi pembayaran TPP sebagaimana yang diatur dalam perwali TPP No 33 tahun 2024	Inspektorat	Telah dilaksanakan	23 Desember 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1ZT0SbF5uXl2_pkUh8hRryK9m2L9WCHJX?usp=sharing
---	--	---	-------------	--------------------	------------------	---



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 ini, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi pemerintah kota Palu selama Tahun 2025. LAKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan perjanjian kinerja Wali Kota Palu tahun 2025.

Secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis yang ditargetkannya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (*performance results*) Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Palu selama Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan yang tertuang didalam RPJMD Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Sasaran strategis sebanyak 8 (delapan) sasaran sebagaimana yang telah ditargetkan, sedangkan target yang digunakan sebagai dasar pengukuran mencakup 12 indikator kinerja sasaran.

Capaian dari 8 sasaran yang meliputi enam indikator kinerja sasaran 100%, sementara enam indikator lainnya capaian di bawah 100%. Secara keseluruhan indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 cukup baik dengan capaian sangat baik seperti indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kewaspadaan nasional, persentase jalan yang berkeselamatan, indeks pembangunan manusia dan opini BPK karena memiliki capaian $\geq 100\%$. Sedangkan beberapa indikator memiliki nilai dibawah 100% atau belum mendapatkan nilai yang sangat baik karena faktor internal maupun eksternal seperti laju pertumbuhan ekonomi, indeks resiko bencana, persentase luas kawasan kumuh, persentase rumah tidak layak huni, angka kemiskinan, indeks aktualisasi pancasila dan indeks reformasi birokrasi.

Dapat dilihat dari penjelasannya, persentase yang paling rendah ada pada indikator persentase luas kawasan kumuh dengan capaian -500%. Hal ini terjadi karena banyak pembangunan fisik yang dilakukan ternyata berada di luar titik koordinat(delinasi) kawasan sesuai SK penetapan pada tahun 2021. Akibatnya, secara fisik kawasan membaik namun secara administrasi tidak mengurangi angka luasan kawasan kumuh yang tercatat. Selain itu, ada pemutakhiran data luas kawasan kumuh karena penambahan kewenangan provinsi di tengah periode sehingga cukup sulit menjaga konsistensi perbandingan dengan renstra dan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran(POKIR) anggota dewan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan sehingga memicu perubahan lokasi pekerjaan secara mendadak.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Palu didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja dalam APBD Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.853.451.710.343 dengan realisasi sebesar Rp.1.751.321.038.062,37 atau 94,48%, proses perencanaan dan penganggaran yang lebih fokus, tematik, holistik, dan integratif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, telah tercapai sesuai dengan target yang telah diperjanjikan.

Hal ini bisa memberikan gambaran bahwa implementasi perencanaan anggaran yang berbasis sasaran telah berjalan dengan baik. Olehnya, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi internal menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran Tahun 2025.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 ini dibuat. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Palu di masa yang akan datang.

B. LANGKAH SELANJUTNYA

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah kota Palu tahun anggaran 2025, dapat diuraikan beberapa langkah korektif yang akan menjadi arahan kebijakan dalam perencanaan tahun anggaran 2026, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan peningkatan kinerja perangkat daerah dengan menyusun penjenjangan kinerja hingga ke level jabatan pengawas serta mendistribusikan tugas dan peran melalui penyusunan matriks peran dan hasil kerja pada jabatan pelaksana dan fungsional.
2. Perlu pemanfaatan anggaran secara efisien guna menunjang target sasaran yang telah ditetapkan dengan menyusun *logical framework* pada setiap program dan kegiatan.
3. Perlu dilakukan optimalisasi kinerja, peningkatan kapasitas dan manajemen kepegawaian untuk mencapai tingkatan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh ASN Pemerintah kota Palu.
4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam melaksanakan tugas untuk menunjang sistem kerja yang efektif sehingga target kinerja bisa dicapai secara optimal.
5. Penguatan perencanaan kinerja guna menyelaraskan antara dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) secara konsisten, serta memastikan indikator kinerja disusun secara spesifik, terukur, relevan dan berorientasi pada outcome.
6. Penyempurnaan penetapan target kinerja dengan menetapkan target kinerja berbasis data historis, tren capaian, serta mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur.
7. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan mengembangkan sistem pengumpulan dan validasi data kinerja yang akurat serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi capaian kinerja
8. Penguatan analisis dalam pelaporan kinerja secara lebih analitis dengan memuat perbandingan capaian, melakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat serta melakukan analitis efisiensi penggunaan sumber daya.

9. Menerapkan budaya kinerja (*Performance Culture*) dengan mendorong perubahan pola kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya pada penyerapan anggaran
10. Adanya penguatan keterkaitan perencanaan dan penganggaran sehingga ada keterkaitan dengan jelas antara program/kegiatan dengan alokasi anggaran, sehingga penggunaan sumberdaya lebih efektif dan efisien.
11. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah sehingga keterpaduan pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan daerah lebih optimal.
12. Pemanfaatan hasil LAKIP sebagai dasar kebijakan dan sebagai instrumen utama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depannya (*evidence-based policy*).

Akhir kata dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palu diharapkan dapat memberikan informasi secara memadai kepada publik serta pihak-pihak yang memerlukan. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan maupun merencanakan pembangunan serta penyelesaian isu-isu strategis dengan lebih efektif dan efisien.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA PALU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADIYANTO RASYID

Jabatan : Wali Kota Palu

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 6 Oktober 2025
WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Pemerintah Kota Palu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	5,0
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	100
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	75.28
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	63
4	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	Persentase jalan yang berkeselamatan	8.38
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	1,1
		Persentase luas Kawasan kumuh	0.03
5	Meningkatnya ualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	84,37
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	4.75
7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal dan kebangsaan	Indeks aktualisasi pancasila	84
8	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Opini BPK	WTP

Program Dan Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	IKU DAN PROGRAMAN PROGRAM	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Rp 103.504.612.512,14
	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.456.574.150,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.587.299.397,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 718.556.750,00
		Program Pemasaran Pariwisata	Rp 3.986.736.400,00
	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp 83.263.000,00
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 152.892.600,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Rp 643.976.600,00
		Program Pengembangan Umkm	Rp 12.453.016.759,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.278.849.894,00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 367.977.400,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 59.745.400,00
		Program Hubungan Industrial	Rp 190.159.800,00
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 17.550.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.448.792.081,15
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 7.542.836.700,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 1.314.690.000,00
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp 171.695.500,00
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp 7.011.342.416,56
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 55.200.000,00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 40.325.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 61.643.200,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 55.755.150,00

	Kawasan Ekonomi Khusus	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 90.326.000,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 143.430.000,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 3.109.900.000,00
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 450.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.911.566.378,32
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 466.966.650,00
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 80.481.500,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.230.961.199,46
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.692.911.012,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 2.494.941.819,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 812.948.973,86
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 3.506.876.220,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 397.018.850,00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 21.488.600,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.722.865.746,79
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 93.184.975,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 32.836.700,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 595.384.390,00
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 905.104.600,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 496.090.700,00
2	Indeks Risiko Bencana		Rp 103.045.580.293,62
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 608.926.300,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7.587.947.906,67

		Kabupaten/Kota	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 856.454.000,00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 47.238.000,00
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 10.050.250,00
		Program Penatagunaan Tanah	Rp 644.351.700,00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 828.188.800,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.522.430.405,85
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Rp 2.030.213.025,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.216.857.358,10
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 70.692.922.548,00
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Rp 59.752.858.280,96
	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 193.347.600,00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 817.202.722,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 12.803.183.579,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp 345.323.150,00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 2.269.989.300,00
		Program Pengelolaan Persampahan	Rp 27.107.132.030,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.216.679.899,96
4	Indeks Kewaspadaan Nasional		Rp 32.198.411.188,56
	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 3.451.690.000,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 23.869.400.926,56
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.476.269.212,00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 59.022.900,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 2.690.570.850,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 651.457.300,00
5	Persentase Jalan yang Berkeselamatan		Rp 104.432.086.144,64
	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp 42.344.077.548,99
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.961.488.388,65
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 45.997.705.207,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 128.815.000,00
6	Persentase Rumah tidak layak huni		Rp 8.581.201.820,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	Rp 566.233.700,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.014.968.120,00
7	Persentase Luas Kawasan Kumuh		Rp 54.056.345.985,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Kawasan Permukiman	Rp 12.018.386.000,00
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 10.617.670.400,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Rp 16.155.144.483,00

		Utilitas Umum (Psu)	
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp 2.482.592.680,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.114.469.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 413.331.100,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 4.254.752.322,00
8	Indeks Pembangunan Manusia		Rp 651.773.5970.847,57
	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 114.541.975.004,19
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 113.235.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 338.060.929.224,05
		Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 3.595.318.850,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 111.175.000,00
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 77.217.235.490,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 923.323.000,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 263.903.900,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 245.102.900,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 82.142.354.370,82
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Rp 259.307.450,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.923.838.897,62
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp 3.493.467.408,00

		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp 2.345.459.400,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 27.111.700,00
		Program Perlindungan Perempuan	Rp 449.362.650,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 1.167.705.400,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.326.611.363,52
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 31.750.500,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp 128.613.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 85.561.900,00
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 8.442.683.400,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 496.022.600,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.381.922.439,37
9	Angka Kemiskinan		Rp 25.329.780.006,90
	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 241.176.100,00
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 11.464.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	Rp 965.617.875,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 14.595.458.535,00
		Program Penanganan Bencana	Rp 1.377.506.360,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.138.557.136,90
10	Indeks Aktualisasi Pancasila		Rp 8.620.004.578,22
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 3.516.327.350,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.103.677.228,22

11	Indeks Reformasi		Rp 610.199.927.918,56
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 23.226.641.800,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 3.235.734.950,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 52.400.441.599,24
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 1.328.424.100,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 3.855.045.930,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.717.458.931,14
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 418.239.750,00
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 235.893.500,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Program Pengelolaan Arsip	Rp 89.553.150,00
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp 27.339.000,00
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp 2.460.000,00
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 945.245.200,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp 54.755.800,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.388.041.429,90
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 328.044.000,00
		Program Pencatatan Sipil	Rp 107.119.150,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 58.347.400,00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 22.800.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.785.582.589,83
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 934.270.000,00
		Program Penunjang Urusan	Rp 4.418.449.952,86

		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Badan Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 8.899.586.350,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28.438.275.710,97
	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Rp 1.842.473.702,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.807.901.738,58
	RSU. Anutapura	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 19.891.323.320,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 43.459.200,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 200.820.403.695,56
	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp 21.688.368.100,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.964.495.366,57
	Kecamatan Palu Selatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 8.160.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 11.195.455.933,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 241.950.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.029.059.996,88
	Kecamatan Mantikulore	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 55.680.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 13.982.213.270,97
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 387.115.450,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.821.089.061,90
	Kecamatan Palu Barat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 13.395.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 8.833.270.155,73
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 352.234.800,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.134.222.290,43
	Kecamatan Palu Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 7.532.500,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 8.314.422.406,97
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 381.135.100,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.113.268.267,52
	Kecamatan Tatanga	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 16.015.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 9.574.332.400,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 338.500.000,00
	Kecamatan Palu Barat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 13.395.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 8.833.270.155,73
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 352.234.800,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.134.222.290,43
	Kecamatan Palu Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 7.532.500,00

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 8.314.422.406,97
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 381.135.100,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.113.268.267,52
	Kecamatan Tatanga	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 16.015.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 9.574.332.400,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 338.500.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.253.297.009,91
	Kecamatan Tawaeli	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 13.111.600,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 9.689.166.971,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 342.796.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.432.646.832,43
	Kecamatan Ulujadi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 32.869.700,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 11.315.885.048,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 804.938.850,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.604.810.591,63
	Kecamatan Palu Utara	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 7.085.600,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 9.168.913.300,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 309.734.800,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 9.386.444.566,40

		Kabupaten/Kota	
12	Opini BPK		Rp 37.718.440.042,69
	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 191.332.000,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.090.587.100,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.210.939.562,87
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 7.809.398.466,25
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.268.573.600,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.147.609.313,57

Palu, 6 Oktober 2025
WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 800/110/ORGANISASI/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR
800/116/ORGANISASI 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2021-2026**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palu yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/org/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021- 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Wali Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/org /2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021- 2026.
- KESATU : Melakukan perubahan atas keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/ORG/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama

organisasi perangkat daerah Pemerintah kota Palu
sesuai tugas fungsi serta mandat yang diemban.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2023

 **WALI KOTA PALU,**

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 PALU
 NOMOR : 800/116/ORGANISASI/2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA PALU
 TAHUN 2021 - 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawab
1. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi	$R = \frac{GNP_t - GNP_{t-1}}{GNP_{t-1}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata,Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	2. Indeks risiko bencana	$DR = H \times V \text{ (Risiko Bencana = Bahaya x Kerentanan)}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum.
	3. Indeks kualitas lingkungan hidup	$IKLH = (30\% \times \text{Indeks Kualitas Air} + 30\% \times \text{Indeks Kualitas Udara} + 40\% \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$	Dinas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatnya keamanan dan	4. Indeks kewaspadaan nasional	Perhitungan dari Dirjen	Badan Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

ketertiban lingkungan		Politik dan PUM Kemendagri	
4. Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	5. Persentase jalan yang kerkeselamatan	Panjang jalan Kota yang memenuhi standar keselamatan / panjang jalan kota x 100%	Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.
	6. Persentase luas kawasan kumuh	Luas kawasan Permukiman kumuh (Ha) / Total Luas Wilayah (Ha) x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum.
	7. Persentase Rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni / Jumlah Rumah di Kota Palu x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
5. Meningkatnya kualitas SDM	8. Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan IPM = $\frac{(IPMt-IPMt-1) \times 100}{IPMt-1}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda & Olahraga.
6. Menurunnya angka kemiskinan	9. Angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin = (jumlah penduduk miskin / jumlah penduduk total) x 100%	Dinas Sosial.
7. Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan,	10. Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks Dj = $\frac{1}{n_j} (\sum X_i)$ Dj adalah Sila ke-j	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

kearifan lokal, dan kebangsaan		n_j adalah banyaknya indikator di Sila ke-j X_i adalah nilai indikator ke-i $IAP = \frac{1}{n} (\sum D_j)$ D_j adalah nilai indeks Sila ke-j n adalah banyaknya sila (yang mana dalam IAP n=5)	
8. Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan	11. Indeks Reformasi Birokrasi	RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik Nilai RB General diperoleh dari: Nilai capaian strategi pelaksanaan RB General, Nilai tingkat implementasi kebijakan, Nilai capaian strategis. Nilai RB Tematik diperoleh dari: Nilai strategi membangun RB Tematik, Nilai capaian dampak RB Tematik.	Semua Organisasi Perangkat Daerah
	12. Opini BPK	Hasil Audit BPK	BPKAD, Inspektorat





**LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2025**



**INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2026**

Nomor : 706/22-LHR/RHS/IB-I/ITKOT/2026
Tanggal : 30 Maret 2026



PEMERINTAH KOTA PALU
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letjen Soeprapto No. 36 Palu Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur
www.inspektorat.palukota.go.id / Nomor Pengaduan Masyarakat: 08114501100

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait tujuan memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 30 Maret 2026

INSPEKTUR,



Dr. Ir. Mohamad Rizal.,S.T.,M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196910272000121003



PEMERINTAH KOTA PALU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letjen Soeprapto No. 36 Palu Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur
www.inspektorat.palukota.go.id / Nomor Pengaduan Masyarakat: 08114501100

Palu, 30 Maret 2026

Nomor : 706/22-LHR/RHS/IB-I/ITKOT/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja
Pemerintah Kota Palu Tahun 2025

Kepada
Yth. **WaliKota Palu**
Di-
Palu

Dengan ini kami sampaikan Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Pernyataan Reviu

Inspektorat Daerah Kota Palu telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Palu Tahun 2025. Reviu dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan **keyakinan terbatas** bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Seluruh substansi informasi dalam LKjIP merupakan tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu. Berdasarkan hasil reviu, tidak ditemukan kondisi material yang mempengaruhi keandalan informasi kinerja yang disajikan.

B. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Intansi Pemerintah.

2. Surat Perintah Wakil Wali Kota Palu Nomor 800.1.11.1/101-ITKOT/2026 tanggal 11 Maret 2026.

C. Waktu Pelaksanaan Reviu

Adapun waktu pelaksanaan atas reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d 31 Maret 2026, dengan susunan Tim Reviu sebagai berikut:

- Dr. Mohamad Rizal, S.T.,M.Si : Penanggungjawab
- Andrie Novandy, S.Pd.I.,M.M : Wakil Penanggungjawab
- Evangelyn Ocsin K, S.H.,M.M : Pengendali Teknis
- Arif Rahman.,S.Sos.,M.Si : Ketua Tim
- Arry Hartanto Soenjoto.,S.T : Anggota Tim
- Sarwoto.,S.E : Anggota Tim
- Rahmi.,S.E : Anggota Tim
- Eko Suprimai Danaputra.,S.T : Anggota Tim

D. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2025 mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Adapun ruang lingkup reviu meliputi :

- Pengujian terbatas atas Format Laporan Kinerja (LKj) yang disusun terkait keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
- Pengujian terbatas atas Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja (LKj);
- Pengujian terbatas atas Substansi Laporan Kinerja (LKj) terkait keselarasan antara perencanaan strategis Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis perangkat daerah, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

E. Uraian Hasil Reviu

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Pengujian terhadap Format Laporan Kinerja (LKj)

Berdasarkan hasil reviu terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data Penting Instansi (Bab I): Laporan telah memuat penjelasan umum mengenai organisasi Pemerintah Daerah, termasuk aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi.
2. Penyajian Informasi Kinerja (Bab I, II, dan III): Laporan secara lengkap menyajikan uraian organisasi, rencana dan target kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja.
3. Capaian Kinerja (Bab III): Laporan telah menyajikan perbandingan realisasi dengan target tahunan, kinerja antar tahun dan target jangka menengah (Renstra). Terdapat pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi sumber daya dan analisis program penunjang serta telah menyajikan realisasi kinerja dengan standar nasional.
4. Lampiran Pendukung (Bab II): Laporan telah menyertakan lampiran berupa Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja lainnya. Meskipun terdapat catatan pada poin Renstra/RPJMD, status akhirnya dinyatakan terpenuhi.
5. Upaya Perbaikan (Bab III): Laporan telah menyajikan narasi mengenai rencana dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan organisasi di masa mendatang.
6. Akuntabilitas Keuangan (Bab III): Laporan telah memuat realisasi anggaran sesuai Perjanjian Kinerja, perbandingan

realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya, serta interpretasi atas penggunaan anggaran tersebut.

1.2. Pengujian terhadap Mekanisme Penyusunan

Hasil revidi terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unit Kerja Penyusun: Laporan Kinerja (LKjIP) Kota Palu Tahun 2025 telah disusun oleh unit kerja yang berwenang, yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu, sesuai dengan SK Wali Kota Palu Nomor: 008/380/Organisasi/2025.
2. Dukungan Data: Informasi dalam laporan kinerja telah didukung oleh data yang memadai, mencakup data umum organisasi, data anggaran (target dan realisasi) serta data pengukuran dan capaian kinerja yang disajikan secara rinci di Bab III.
3. Mekanisme Penyampaian Data: Telah terdapat regulasi yang mengatur mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun yang berpedoman pada:
 - 1) Peraturan Walikota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - 2) Surat Keputusan (SK) Walikota Palu Nomor: 000.8.1 / 324 /Organisasi/2024 tentang Pedoman Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja.
4. Penanggung Jawab Data: Penanggung jawab pengumpulan data di setiap unit kerja telah ditetapkan melalui SK Tim Penyusun LAKIP Kota Palu Tahun 2025 disertai dengan pembagian tugas yang jelas.
5. Keandalan Data: Data kinerja diyakini keandalannya karena bersumber dari OPD yang bertanggung jawab, melalui mekanisme perhitungan yang benar, bersifat *up-to-date*, dan

proses pengumpulannya dapat ditelusuri melalui aplikasi e-SAKIP Kota Palu.

6. Analisis dan Validasi Pimpinan: Narasi analisis dalam laporan kinerja telah diketahui dan divalidasi oleh pimpinan organisasi.

1.3. Pengujian Atas Substansi Laporan Kinerja (LKj)

Berdasarkan hasil reviu terhadap Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Perjanjian Kinerja: Berdasarkan hasil reviu, seluruh (8 item) tujuan atau sasaran yang tercantum dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi perencanaan operasional tahunan.
2. Keselarasan dengan Perencanaan Strategis (RPJMD / Renstra): Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan Rencana Strategis. Delapan sasaran utama, mulai dari sektor ekonomi hingga tata kelola pemerintahan, memiliki keterkaitan yang kuat dengan dokumen perencanaan jangka menengah.
3. Kesesuaian dengan Indikator Kinerja: Sasaran-sasaran dalam Laporan Kinerja telah didukung oleh Indikator Kinerja yang relevan. Sebagai contoh, sasaran kualitas SDM diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia dan sasaran tata kelola pemerintahan diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi serta Opini BPK.
4. Kesesuaian dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): Terdapat kesesuaian antara sasaran laporan dengan IKU yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa apa yang dilaporkan merupakan indikator prioritas keberhasilan organisasi.
5. Perbandingan Data Kinerja :
 - a. Peningkatan: Terjadi kenaikan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kewaspadaan Nasional, IPM dan Indeks Reformasi Birokrasi.

- b. Penurunan: Laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan (positif karena targetnya adalah menurunkan angka), dan Indeks Aktualisasi Pancasila menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
 - c. Opini BPK mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
6. Kecukupan Alat Ukur: Seluruh indikator kinerja (IK) dan indikator kinerja utama (IKU) dinyatakan cukup untuk mengukur tingkat keberhasilan dari setiap tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
7. Kualitas Indikator (Kriteria SMART): Hasil pengujian terhadap 12 indikator kinerja menunjukkan bahwa seluruhnya telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*).

2. Catatan Koreksi

Berdasarkan revidi, selain hal-hal yang disebutkan dalam simpulan, Tim Penyusun perlu melakukan perbaikan pada aspek-aspek berikut:

a. Format

- Memperbaiki kesalahan ketik (*typo*) dan menggunakan kata baku (contoh: "Olahraga").
- Menulis istilah asing dengan huruf miring (*italic*) serta menstandarkan penulisan angka nominal uang dan symbol.
- Merapikan tata letak (*layout*) agar tidak ada kalimat yang terpotong di akhir halaman dan memastikan nomor tabel sudah sesuai dengan isinya.
- Mencantumkan penomoran halaman secara sistematis dan konsisten pada seluruh bagian dokumen.

b. Mekanisme Penyusunan

- Melakukan penyelarasan data antar unit kerja agar angka pada grafik, tabel, dan uraian teks tidak berbeda (inkonsisten).
- Menyusun penjelasan mengenai hambatan kerja secara lebih objektif dan profesional.

c. Substansi.

- Memperbaiki cara penghitungan capaian, khususnya untuk indikator yang bersifat negatif (seperti jumlah rumah tidak layak huni).
- Memeriksa kembali angka capaian yang terlihat tidak wajar untuk menjaga tingkat kepercayaan laporan.

F. Saran

Berdasarkan simpulan hasil revidi diatas, kami menyampaikan saran kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu melalui Sekretaris Daerah sebagai berikut:

1. **Format:** Melakukan perbaikan penulisan secara menyeluruh termasuk koreksi kesalahan (typo), penggunaan bahasa baku, penulisan angka sesuai formulasi hasil IKU, pencantuman nomor halaman, penggunaan istilah asing yang tepat serta penataan ulang tata letak dokumen.
2. **Mekanisme Penyusunan:** Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk sinkronisasi data antara tabel dan narasi serta memastikan penggunaan satu sumber data realisasi tahun 2025 yang paling mutakhir guna menjaga konsistensi dan integritas informasi.
3. **Substansi:** Menyempurnakan metode penghitungan capaian kinerja (khususnya pada indikator bernilai negatif) serta melakukan validasi ulang terhadap angka-angka yang tidak wajar untuk menjamin keandalan dan akurasi laporan.

G. Tindak Lanjut Hasil Revidi Sebelumnya

Berdasarkan tindak lanjut hasil revidi, seluruh catatan serta rekomendasi yang diberikan pada revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Palu sebelumnya telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Tim Penyusun. sesuai dengan standar yang ditetapkan.

H. Apresiasi

Inspektorat Kota Palu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2025, khususnya pada pejabat dan pegawai dilingkup unit kerja Bagian Organisasi Sekretariat Kota Palu selaku Sekretariat Tim Penyusun atas kerja sama dan bantuannya dalam memberikan data dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Ir. Mohamad Rizal., S.T., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196910272000121003

AWARDS

2025

SENIN, 10 DESEMBER 2025
Auditor, Auditorian PU



PIAGAM PENGHARGAAN

1



26-06-2026

KOTA PALU TERBAIK 1 Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sulteng
Wakil Walikota Palu Imelda Liliana Muhidin, SE, MAP menghadiri acara malam Penganugerahan Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sulteng.

Acara yang diinisiasi BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulteng tersebut di gelar di ruang pertemuan Hotel Santika Palu pada Kamis malam 26-06-2026.

2



30/06/2025

Kota Palu Raih Penghargaan Atas Kinerja dalam Konvergensi Penanganan Stunting
Kota Palu berhasil meraih predikat terbaik ke-6 dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah atas kinerja 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024, dan memperoleh hadiah sebesar Rp100 juta.



3



22/07/2025

Pemerintah Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin bersama Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kota Palu, Ridwan Karim, menghadiri pengukuhan bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Organisasi dan Sektoral Tahun 2025.

4



25/8/2025

Kota Palu kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama tahun 2025 di tingkat nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.



5



11/09/2025

Kota Palu menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang berhasil meraih apresiasi sebagai Daerah Peduli Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi dari Kompas TV.

Menurut wali kota, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Palu yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik dan menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.



6



27/09/2025

Pemerintah Kota Palu menerima penyerahan delapan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum RI, Ir. Razilu, didampingi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng).



7



3/10/2025

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan kepada Kelurahan Tanamodindi, yang berhasil meraih predikat Kelurahan Terbaik se-Provinsi Sulawesi Tengah dalam Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (13/10/2025).



8



10/10/2025



Pemerintah Kota Palu meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi dalam ajang TPAKD Award 2025. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E., dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD yang berlangsung di Jakarta, Jumat (10/10).

9



8/11/2025

Pemerintah Kota Palu kembali meraih prestasi di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai Pemerintah Kota Terbaik I kategori Best Sustainable Ecology Innovation 2025 dalam ajang Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E., pada acara puncak ISNA 2025 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).



10



12/11/2025

Kota Palu menerima penghargaan sebagai Kota Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting, dan menjadi satu-satunya daerah di Pulau Sulawesi yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Wali Kota Palu, H. Hadiano Rasyid, S.E., di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, yang berlangsung di Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).

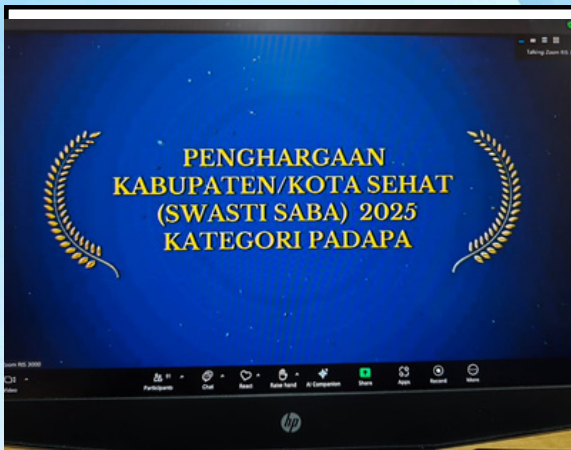
URUNAN STUNTING TAHUN 2025

omitmen Bersama untuk Pencegahan
an Penurunan Stunting di Indonesia

11



28/11/2025



Kota Palu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dua penghargaan bergengsi berhasil diraih secara bersamaan, yakni **Penghargaan Kota Sehat (Swasti Saba) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Predikat Madya** tahun 2025.

12



28/11/2025



Kota Palu kembali raih penghargaan sebagai TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2025 untuk kawasan Sulawesi. TPID Kota Palu menonjol melalui berbagai inovasi strategis yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

13



1/12/2025

Kota Palu dinobatkan sebagai Terbaik Pertama dalam kategori Transformasi Pengelolaan Sampah Tingkat Nasional.

Kota Palu sekaligus menjadi satu-satunya daerah dari kawasan Indonesia Timur yang berhasil menembus enam besar nasional.

Sutami Award adalah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi bermakna dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.



14



10/12/2025



Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menerima penghargaan bergengsi sebagai Mitra Perorangan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Predikat Gold dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung pada Rabu (10/12/2025) di Jakarta saat kegiatan "Genting Collaboration Summit 2025"

15



15/12/2025

Pemerintah Kota Palu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih apresiasi Kinerja dan Inisiatif Pembangunan Daerah Tahun 2025 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI.

Penghargaan tersebut diterima pada Senin (15/12/2025) di Aula Kantor Kementerian PPN/Bappenas RI.

